

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta, atas nama rakyat Indonesia, memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang diraih setelah berjuang selama beratus-ratus tahun, dengan mengorbankan seluruh yang dimiliki, baik harta dan nyawa sekalipun. Semua rakyat Indonesia berjuang demi sebuah kata yang mudah diucapkan, tetapi membutuhkan pengorbanan besar dalam mewujudkannya, yaitu merdeka. Sebuah kata yang bermakna secara luas sebagai pembebasan dari sebuah kebelengguan, dalam konteks ini bebas dari belenggu negara lain. Sebuah kata yang bermakna tanggungjawab besar mewujudkan harapan dan cita-cita luhur bangsa, mensejahterakan masyarakat secara adil dan makmur.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah pemberian dari negara penjajah (dalam hal ini Jepang). Kemerdekaan ini merupakan buah dari pengorbanan dan perjuangan seluruh rakyat Indonesia, yang dengan keikhlasan menjadi martir dalam garis depan perjuangan. Indonesia juga bukanlah negara fasis buatan Jepang, bukan negara boneka "*made in Japan*", setelah negaranya porak poranda pada Perang Dunia II. Untuk menunjukkan diri sebagai bangsa yang merdeka dan mandiri berdasar nilai-nilai demokrasi, Pemerintah Republik Indonesia melalui Wakil Presiden mengeluarkan maklumat no X/1945, yang menghimbau rakyat untuk membentuk partai politik dan aktif didalamnya guna

menyongsong Pemilihan Umum dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang *legitimate*.¹

Menyambut himbauan ini, maka di Yogyakarta pada Tanggal 7-8 November 1945 diadakanlah Mukhtar Islam Indonesia, dengan salah satu hasilnya menyatukan gerak perjuangan dalam sebuah wadah partai politik, yaitu partai Masyumi. Tampilnya Masyumi sebagai partai Islam yang bercorak kesatuan dalam bulan-bulan pertama kemerdekaan Indonesia bukanlah suatu kebetulan dalam sejarah (*an historical accident*) yang tidak dilatarbelakangi kesadaran yang dalam dan panjang. Akar kesadaran politik umat Islam pada masa modern dapat ditelusuri dengan bangkitnya Sarekat Islam (SI) sebelum Perang Dunia I. SI merupakan transformasi dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada tahun 1911. SI adalah gerakan politik pertama dalam sejarah modern Indonesia.² Untuk kepentingan pembahasan penelitian ini, maka kami akan menelusuri kebangkitan kesadaran politik umat Islam pada sejak berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), di mana SI menjadi salah satu faksi di dalamnya.

Berdirinya berbagai organisasi, baik yang bersifat nasional maupun lokal, sejak berdirinya SI, membuat para tokoh umat Islam memikirkan bagaimana untuk menjalin kerjasama di antara organisasi itu, dan mencegah timbulnya konflik di antara umat Islam sendiri. Maka berdasar prakarsa KH Wahab Chasbullah (Nadhatul Ulama), KH Mas Mansur (Muhammadiyah), dan KH

¹ Sidang PPKI pada Tanggal 18 Agustus 1945 mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia.

² A. Syafii Maarif, 1996, *Islam dan Politik : Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, Gema Insani Press : Jakarta hal. 15-16

Achmad Dahlan (nonpartai) didirikanlah MIAI di Surabaya pada 21 September 1937. Ada dua alasan mengapa MIAI amat urgen didirikan. *Pertama*, sebagai menggalang persatuan di antara umat Islam, yang saat itu dipandang belum mantap, guna menghadapi kaum kolonial, dan meningkatkan kedudukan politik umat Islam. *Kedua*, merupakan pengejawantahan landasan spiritual Al Quran surat Ali Imran Ayat 103, yang menyerukan umat untuk tidak bertikai. Ayat ini membimbing pemimpin-pemimpin umat Islam dalam membentuk MIAI yang pada waktu itu dipandang cukup strategis untuk menggalang persatuan di antara kekuatan-kekuatan partai dan organisasi Islam dalam menghadapi situasi yang makin kritis.³

Pada tahun 1942 kekuasaan kolonial Belanda terusir dari Indonesia bukan oleh bangsa Indonesia, melainkan karena pasukan Jepang tanpa perlawanan yang berarti. Berbeda dengan Belanda terhadap Islam yang menerapkan non politik, pihak Jepang berusaha mendekati para pemimpin umat, dalam rangka meraih dukungan untuk keperluan perang yang sedang dihadapinya. Untuk mendekatkan komunitas Islam kepada Jepang, pihak penguasa merestui pembentukan sebuah Majelis Perkumpulan-perkumpulan Muslim Indonesia, yakni Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia, atau Masjumi.⁴ Alasan pembubaran MIAI, dan kemudian digantikan Masyumi, merupakan *move* Jepang untuk menghilangkan kesan sebagai penjajah. Dilihat dari Anggaran Dasar maka amat jelas dapat dilihat bahwa dalam pembentukan Masyumi merupakan campur tangan dari Jepang

³ *Ibid*, hal 16

sehingga ada anggapan bahwa Masyumi merupakan transformasi MIAI yang sudah diperkosa Jepang.⁵

Walaupun demikian berdirinya Masyumi menjadi salah satu tonggak penting bagi sejarah politik umat Islam di Indonesia. Di masa pendudukan bala Tentara Jepang, Masyumi merupakan sebuah badan federatif perjuangan umat Islam di Indonesia. Sejak saat itu Masyumi memegang peranan aktif dalam menggerakkan rakyat melawan kaum penjajah, dan bersama *Jawa Hooko Kai* aktif dalam persiapan kemerdekaan Indonesia.⁶

Pendirian partai Masyumi pada awal kemerdekaan itu merupakan sebuah jawaban untuk membersihkan citra sebagai bentukan Jepang. Partai Masyumi yang berdiri tahun 1945 bukanlah Masyumi "*made in Japan*" seperti yang dibentuk atas "kebaikan" penguasa Jepang di Indonesia. Masyumi yang berdiri pada 7-8 November 1945 sepenuhnya merupakan hasil karya pemimpin-pemimpin umat Islam dalam sebuah kongres bertempat di gedung Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah, Yogyakarta. Adapun nama Masyumi tetap dipakai semata-mata karena hasil musyawarah bulan itu.⁷

Terdapat perbedaan dalam aktivitas perjuangan pada masa penjajahan dan masa pergerakan. Pada masa pergerakan kebangsaan coraknya lebih menekankan pada pemikiran karena pada masa penjajahan praktek demokrasi tidak mungkin berkembang. Partisipasi umat Islam pada kedua masa tersebut juga mengalami perbedaan. Sebelum Masyumi menyatakan diri sebagai partai politik, dalam

⁵ M. Rusli Karim, 1983, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah Potret Pasang Surut*, Rajawali : Jakarta, hal. 69

⁶ *Ibid*, hal. 70

⁷ A. Syafii Maarif, *Op. Cit*, hal. 31

berbagai lembaga formal yang mempersiapkan kemerdekaan dapat dilihat keterlibatan tokoh umat Islam secara kuantitas sangat minimal, padahal umat Islam adalah yang terbesar di Indonesia. Di dalam BPUPKI yang dibentuk tahun 1944 hanya terdapat 15 orang (25 %) dari 60 anggota (kemudian 17 dari 68 anggota) tergolong ke dalam kalangan Islam, lalu menjadi 2 dari 21 anggota (kemudian 3 dari 29) dalam badan yang sama yang dibentuk pada Agustus 1945 dari kalangan Islam. Tampilnya Masyumi memberikan perhatian yang lebih proporsional kepada umat Islam dalam lembaga perwakilan maupun dalam birokrasi pemerintahan.⁸

Pada mulanya hanya empat organisasi yang masuk menjadi anggota Masyumi; Muhammadiyah, Nadhatul Ulama (NU), Perikatan Ummat Islam, dan Persatuan Umat Islam.⁹ Namun seiring berjalannya waktu keanggotaan Masyumi meluas, bahkan hampir semua organisasi Islam lokal dan nasional mendukung kehadiran Masyumi sebagai satu-satunya partai politik Islam.

Maka tersebarlah masyumi ke seluruh Nusantara yang disokong oleh kehadiran anggota istimewa. Di sinilah berfungsi mereka: Muhammadiyah (yang memang lebih tersebar di seluruh Indonesia dibanding organisasi lain), Al-Jamyatul Washliyah (Sumatera Utara termasuk daerah Karo), Al-Ittihadiyah (juga Sumatera Utara), Persatuan Islam (Priangan dan Bangil), Persatuan Umat Islam Indonesia (Majalengka dan Sukabumi), Al-Irsyad (di berbagai tempat di

⁸ M. Rusli Karim, *Op.Cit.*, hal 70

⁹ Deliar Noer, 2000, *Partai Islam dalam Pentas Nasional : Kisah dan Analisis Politik Indonesia 1945-1967*, Mizan : Bandung, hal. 57

Selain ditunjang oleh keberadaan anggota istimewa, faktor lain yang menyebabkan Masyumi cepat berkembang ialah peranan ulama setempat serta ukhuwah islamiyah yang relatif tinggi pada masa-masa sesudah revolusi.¹¹ Maka tidak heran pada akhir tahun 1950 tercatat terdapat cabang-cabang Masyumi di tiap Kabupaten, hampir di tiap kecamatan terdapat anak cabang, dan di tiap desa di Jawa terdapat rantingnya. Sedangkan pembentukan di desa-desa luar Jawa telah tercatat 237 Cabang, 1080 anak cabang, dengan 4982 ranting, dengan lebih kurang 10 juta anggota.¹²

Masyumi telah merumuskan tujuan jangka panjang yang hendak diraihinya dalam perjuangan politik. Dalam Anggaran Dasar, tujuan itu dirumuskan secara gamblang sebagai berikut: "*Tujuan partai ialah terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan negara Republik Indonesia, menuju keridhaan Illahi*". Dengan rumusan tujuan ini, Masyumi melalui cara-cara dan saluran-saluran demokratis ingin menciptakan Indonesia yang bercorak islam tapi dengan memberikan kebebasan penuh kepada golongan-golongan lain untuk berbuat dan memperjuangkan aspirasi politik sesuai dengan agama dan identitasnya masing-masing.¹³ Atau dalam ruang lingkup yang lebih luas, dapat dikatakan bahwa tidak ada keinginan bagi Masyumi untuk memaksakan sebuah keyakinan (politik) melalui jalan atau saluran yang a-demokratis.

Seperti dikatakan sebelumnya, para pemimpin umat Islam telah berikrar untuk hanya memiliki satu wadah partai, yaitu Masyumi. Namun kesepakatan

¹¹ *Ibid*

¹² M. Rusli Karim, *Op. Cit*, hal. 71

tidak bertahan lama akibat goncangan dan godaan-godaan politik. Demikianlah pada Juli 1947, unsur Sarekat Islam (SI) dalam Masyumi melepaskan diri dan mengembalikan SI kepada posisi partai yang berdiri sendiri. Perpecahan ini dikarenakan adanya silang pendapat dalam keikutsertaan dalam Kabinet Amir Syarifuddin (sosialis). Dewan pimpinan Masyumi menolak untuk ikut serta, namun unsur SI dalam Masyumi berhasil dijinakkan. Tokoh – tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) merasa ingin memainkan peranan yang lebih penting dan berarti daripada sebelumnya.¹⁴ SI yang telah menjadi PSII kembali memang mempunyai wakil dalam kabinet Amir, yaitu Wondoamiseno (Menteri Dalam Negeri), Sjahbuddin Latief (Menteri Muda Penerangan), Arudji Kartawinata (Menteri Muda I Pertahanan), dan Suriwiyono (Menteri Muda Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan).

Sungguh pun terjadi perubahan susunan kabinet Amir pada November 1947, dengan kesediaan Masyumi untuk turut serta namun tidak terjadi rujuk kembali.¹⁵ Masyumi bersedia masuk dalam kabinet dengan memperoleh empat kursi; Wakil Perdana Menteri I Samsuddin, Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem, Menteri Agama Mohammad Masjkur, dan Menteri Muda Kehakiman Kasman Singodimejo. Jika ditinjau dari data sosiologis pendukung, keluarnya unsur SI tidak begitu berpengaruh, karena SI merupakan subgolongan minimal dalam Masyumi. Meskipun begitu dari sisi psikologis perjuangan Islam hal ini cukup merugikan karena keabsahan Masyumi sebagai representasi partai Islam dipertanyakan kembali.

¹³ Syafii Maarif, *Op. Cit.*, hal. 33-34

¹⁴ Deliar Noer, *Op. Cit.*, hal 219

unsur SI tidak begitu berpengaruh, karena SI merupakan subgolongan minimal dalam Masyumi. Meskipun begitu dari sisi psikologis perjuangan Islam hal ini cukup merugikan karena keabsahan Masyumi sebagai representasi partai Islam dipertanyakan kembali.

Guncangan terbesar dalam tubuh Masyumi terjadi pada Mei 1952, saat NU memutuskan mengikuti jejak SI meninggalkan Masyumi. Sejak itu NU menyatakan diri sebagai partai politik yang berdiri sendiri. Dengan demikian maka tercabik-cabiklah deklarasi November yang mengikrarkan Masyumi sebagai satu-satunya partai umat Islam di Indonesia. Ada dua hal yang melatarbelakangi penarikan diri NU dari Masyumi. *Pertama*, sebagai puncak “ketegangan” antara golongan tua dan golongan muda di dalam tubuh Masyumi.¹⁶ *Kedua*, tidak ditunjuknya tokoh NU sebagai calon menteri agama dari Masyumi dalam kabinet Wilopo.¹⁷

Dengan keluarnya NU maka makin melemahlah Masyumi. Secara kultural dan jumlah pendukung, NU memiliki umat yang cukup besar, terutama di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Tampilnya NU sebagai partai politik sendiri,

¹⁶ Penyebutan “tua” dan “muda” tidak selalu menunjukkan usia. Golongan tua umumnya di bawah pimpinan Sukiman, dan golongan muda kerap disebut sebagai golongan Natsir yang umumnya lulusan “sekolah Belanda”.

¹⁷ KH Fakhri Usman (Muhammadiyah) ditunjuk mewakili Masyumi menduduki posisi Menteri Agama dalam kabinet Wilopo.

Nurcholish Madjid menganggap faktor kedua bukan faktor utama. Menurutnya di kalangan ulama NU, tokoh-tokoh intelektual Masyumi (karena mereka lulusan “sekolah Belanda”-*pen*) tidak layak memimpin umat Islam. Lihat Laksmi Pemuntjak – Djohan, Agus Edy Santoso (ed.), 2004, *Tidak Ada Negara Islam : Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid-Mohammad Roem*, Djambatan : Jakarta, hal. 40

maka umat Islam Indonesia terpecah dalam empat partai; Masyumi, Perti,¹⁸ PSII, dan Partai NU.

Indonesia adalah sebuah negara baru yang memilih sistem demokrasi sebagai sistem politiknya. Pemilihan umum adalah mekanisme yang inherent dalam sistem tersebut. Diharapkan dengan pemilihan umum, rakyat yang memiliki aspirasi politik yang berbeda akan menyalurkan aspirasi melalui partai yang dipilih atau calon yang didukung. Pada masa awal kemerdekaan Pemilihan Umum tidak dapat dilaksanakan karena adanya tiga hambatan. *Pertama*, kegiatan lebih diarahkan pada membendung arus kaum kolonial yang dengan berbagai dalih ingin kembali menginjakkan kakinya. *Kedua*, pertikaian di antara lembaga politik dan pemerintah. Dan *ketiga*, belum adanya UU yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Umum, kendatipun ada ide untuk menyelenggarakannya sudah ada sejak tahun-tahun pertama kemerdekaan.¹⁹

Faktor penghambat ketiga dapat teratasi setelah Rancangan Undang-Undang Pemilu yang telah diserahkan kepada parlemen pada tanggal 25 November 1952 dapat disahkan pada tanggal 4 April 1953. Akhirnya terlaksanalah Pemilihan Umum pertama kali di Indonesia. Pemilu dilaksanakan dua kali, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih wakil-wakil dalam badan perwakilan, dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk membentuk dewan konstituante. Pemilu ini diikuti oleh 37.875.299 dari 43.104.404 penduduk yang

¹⁸ Sejak Awal Perti tidak ikut serta dalam Masyumi. Perti merupakan partai lokal dan hanya memiliki pengaruh di daerah Sumatera.

¹⁹ M. Rusli Karim, *Op. Cit.*, hal. 119

yang memiliki hak pilih. Artinya pemilu kali ini diikuti oleh hampir 87,65 % pemilih yang menggunakan hak pilihnya.²⁰

Pemilu 1955 diikuti oleh 28 (dua puluh delapan) partai politik. Bila ditinjau dari sisi aliran politik,²¹ pemilu kali ini tidak memberikan mayoritas suara mutlak kepada salah satu dari tiga aliran politik utama itu. Aliran Islam hanya mampu meraih 45,2 % (116 dari 257 kursi dalam pemilihan dewan perwakilan); aliran nasionalis 27 % (71 kursi), dan aliran sosialis kiri (komunis) 15,2 % (39 kursi). Kursi-kursi selebihnya dibagi antara partai-partai kecil beraliran nasionalis atau sosialis/marxist. Sementara itu jumlah kursi dalam Majelis Konstituante adalah dua kali lipat jumlah kursi dewan perwakilan (DPR). Dalam pemilu untuk majelis ini, pihak Islam mengalami penurunan peraihan suara, sementara PKI mengalami sedikit kenaikan.²²

Dari Pemilu 1955 telah melahirkan empat partai besar dengan perimbangan kekuatan dalam DPR sebagai berikut : PNI (57 kursi), Masyumi (57 kursi), NU (45 kursi), dan PKI (39 kursi). Selebihnya partai-partai kecil dengan jumlah kurang dari 10.²³

²⁰ Versi berbeda menyatakan bahwa pada Pemilu tahap pertama (29 September) jumlah pemilih mencapai 39 juta, atau dengan kata lain 91,5% menggunakan hak pilih. Suara sah sebesar 87,65%. Dalam rentang waktu pendaftaran sampai pelaksanaan 2,5% meninggal dunia, dan sekitar 6% yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sedangkan pada Pemilu tahap ke dua tercatat sekitar 90% dari jumlah pemilih. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya umumnya karena alasan tidak tahu dan kesulitan transportasi, dan bukan karena alasan politis yang spesifik. Lihat juga Adnan Buyung Nasution, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafika : Jakarta, hal.

²¹ Herbert Feith membagi aliran politik pada masa antara 1945-1965 menjadi lima, yaitu Tradisionalisme Jawa; Nasionalisme Radikal; Islam; Sosialisme Demokratis; dan Komunisme. Lihat Herbert Feith dan Lance Castles, 1988, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, LP3ES : Jakarta hal. xxv.

²² Syafii Maarif, *Op. Cit*, hal. 43

²³ Satu hal yang mengejutkan dari hasil Pemilu ini Partai Sosialis Indonesia (PSI) keluar sebagai partai kecil, padahal salah satu perancang Pemilu 1955 adalah tokoh PSI, Mr. Lukman

Dengan melihat data di atas maka dapat dikatakan bahwa persaingan di antara partai Islam terutama Masyumi dan partai NU. Hasil ini tidak terlalu mengejutkan dan telah diprediksi sejak awal melihat jejak kultural dan jumlah massa yang dimiliki.

Dalam bagian awal bab ini kami telah menuliskan bahwa dukungan organisasi Islam lokal berpengaruh besar dalam perkembangan Masyumi, dan tentu saja dalam perolehan suara pada Pemilu 1955. Di daerah-daerah di mana Masyumi mendapat dukungan organisasi Islam lokal menjadi lumbung suara. Seperti di Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jakarta Raya, Masyumi menempati urutan pertama dalam perolehan suara baik untuk Parlemen maupun Konstituante.

Tidak demikian halnya dengan perolehan suara Masyumi di tingkatan Nusa Tenggara Barat. Walaupun mendapat dukungan dari organisasi Islam lokal, yaitu Nadhatul Wathan (NW), Masyumi hanya menempati peringkat kedua, di bawah Partai Nasional Indonesia (PNI).

Wiriadinata. Mohammad Roem dalam Laksmi Pamuntjak dan Agus Edi Santoso (ed.). *Op. Cit.*, hal. 65

Tabel 1.1. Perolehan Suara Pemilu 1955 di Nusa Tenggara Barat

Nama Partai	Suara Parlemen	Suara Konstituante
PNI	464.398	512.000
Masyumi	264.719	258.358
NU	104.282	102.294
PKI	66.067	78.363
PSII	7.020	5.804
Parkindo	2.944	3.217
Katolik	1.188	1.290
PSI	233.371	190.267
IPKI	-	-
Perti	-	-
Partai Buruh	8.618	12.159
PIR (H)	33.457	-
PRN	14.386	6.582
Baperki	3.859	1.981

Sumber : Hebert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, hal. 103

Dukungan berbagai ormas Islam di Lombok kepada Masyumi tidak hanya berupa pernyataan atau dukungan pasif, tetapi juga aktif berkampanye di seluruh pulau Lombok. Tuan Guru, sebutan 'ulama di Lombok, tidak segan-segan untuk turut berorasi di panggung kampanye untuk memenangkan Masyumi di pulau Lombok. Pilihan masyarakat Lombok kepada Masyumi umumnya disebabkan

karena ketokohan Tuan Guru Zainuddin Abdul Madjid,²⁴ 'ulama besar dari kota Pancor. Ketokohnya yang disebabkan karena kedalaman ilmu dan prilaku yang terkenal santun dan suka membantu dalam bermasyarakat.²⁵

Walaupun dalam Pemilu partai-partai Islam terkesan mengalami persaingan yang hebat dalam merebut simpati umat, namun dalam Badan konstituante terjadi sebuah koalisi. Isu tentang pembentukan negara Islam menjadi sebuah *common platform* di antara partai-partai Islam tersebut. Perjuangan pembentukan negara Islam memang sudah diumumkan dalam kampanye-kampanye partai-partai Islam.²⁶ Hal ini kemudian menjadikan partai Islam untuk bersatu kembali, walaupun bersifat dinamis, seakan mengingatkan kembali pada ikrar November 1945. Karena sejak semula para tokoh Islam selalu menyerukan untuk tetap bekerjasama dan menjalin silaturahmi di antara umat, walaupun berbeda dalam pilihan politik.

Dalam persidangan konstituante dapat kita lihat bagaimana partai-partai Islam dengan teguh memperjuangkan cita-cita Islam tersebut. Sebuah cita-cita yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, dan tanpa segan-segan harus berhadapan dengan partai lain. Perjuangan yang membutuhkan kesungguhan hati, dan tentunya mendapat perlawanan dari partai lain yang tidak sepaham.

Dasar negara merupakan masalah krusial yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kemudian hari. Terhadap dasar negara, terdapat tiga blok dalam konstituante. *Pertama*, blok Islam, yaitu gabungan partai-

²⁴ Tuan Guru Zainuddin Abdul Madjid adalah pendiri sekaligus pemimpin organisasi Nadhatul Wathan (NW) yang bergerak dalam bidang pendidikan.

²⁵ Wawancara dengan Syahibuddin Jauhari 4 Desember 2004

²⁶ Adnan Buyung Nasution, *Op. Cit.*, hal. 68

partai Islam, yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. *Kedua*, blok Pancasila, merupakan gabungan partai-partai nasionalis, menganggap bahwa Pancasila dengan kelima silanya adalah bentuk final dari dasar negara. Dan *ketiga*, blok sosial ekonomi, yang mengajukan ekonomi sosialis dan demokrasi sesuai dengan pasal 33 dan pasal 1 dari UUD 1945.²⁷

Persidangan dalam konstituante berlangsung panas dan sengit, bahkan tidak jarang melibatkan emosi, termasuk wakil dari partai Islam sendiri. Perdebatan ini dapatlah kita lihat sebagai perbedaan pendapat dan kepentingan para wakil rakyat sebagai keinginan mereka menyaksikan Indonesia menjadi negara yang mampu mensejahterakan rakyat secara adil dan merata. Apa yang mereka perjuangkan semata-mata hanya untuk membangun sebuah negara Indonesia yang disegani oleh negara-negara lain di dunia.

Persidangan Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 yang berlarut-larut dalam menyelesaikan Undang-undang baru pengganti UUD 1945 membuat Presiden Soekarno putus asa dan mengambil langkah-langkah yang a-demokratis. Soekarno mulai *muak* dengan perdebatan di konstituante yang berlarut-larut dan cenderung menjadi debat kusir yang berkepanjangan. Banyaknya partai yang menghiasi Konstituante dengan aspirasi dan kepentingan yang beragam mengakibatkan sulitnya menghasilkan UU baru sebagai pengganti UUD 1945 yang bersifat sementara.

Soekarno mulai menunjukkan watak otoriter dan menghujat sistem

1. ... dan berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia

Menurutnya, sistem multi partai merupakan demokrasi *ala* barat, dan tidak tepat diterapkan di Indonesia. Partai politik di mata Soekarno merupakan penyakit yang jauh lebih berbahaya dari penyakit kesukuan dan kedaerahan.²⁸ Ia kemudian mengajak segenap masyarakat untuk mengubur partai-partai, dan bersatu dalam sebuah konsep demokrasi yang khas Indonesia.

Soekarno menawarkan suatu konsep demokrasi yang berasal dari nilai yang digali dari beragam suku bangsa di Indonesia. Ia kemudian mengusulkan untuk dibentuknya sebuah dewan nasional, yang langsung diketuainya. Hal ini tentu saja ditentang oleh berbagai partai non-pemerintah, termasuk Masyumi. Melalui tokoh-tokohnya Masyumi mengecam konsepsi presiden ini, dan seakan membunuh demokrasi. Menurut Masyumi, partai adalah sebuah kemutlakan dalam sistem demokrasi, di mana demokrasi berkembang, maka di sanalah partai turut berkembang.²⁹

Keotoriteran Soekarno mencapai puncaknya dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang isinya menyatakan kembali kepada UUD 1945, dan membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan Dewan Konstituante. Maka dimulailah masa yang kemudian dikenal dengan sebutan “masa Demokrasi Terpimpin”, yang menempatkan Soekarno pada pucuk kekuasaan tertinggi. Sebuah demokrasi gaya baru, yang membawa Soekarno dalam puncak kekuasaan yang sudah lama didambakan, karena pondasinya tidak kokoh, sekaligus menjadi jurang kehancuran bagi karier politiknya. Dia terkubur bersama sistem yang

²⁸ Herbert Feith & Lance Castles, *Op. Cit.*, hal. 63

²⁹ Penolakan Masyumi dapat dilihat dari berbagai statement yang dikeluarkan. Terutama oleh

diciptakannya, sekalipun jasanya terhadap negeri ini tidak akan dilupakan orang sepanjang masa.³⁰

Sejak awal Masyumi sudah menolak dengan tegas gagasan Soekarno ini. Sebuah harga yang harus dibayar dengan mahal, ketika melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 200, Soekarno resmi membubarkan Masyumi. Berakhirlah perjuangan Masyumi dalam memperjuangkan cita-cita Islam. Apalagi kemudian banyak di antara tokoh-tokoh Masyumi dipenjarakan setelah melakukan perlawanan dalam gerakan PRRI/Permesta.³¹ Yang tidak turut dalam pun tidak diberikan alam kebebasan. Penahanan yang dilakukan baik secara berkelompok maupun secara sendiri-sendiri.³²

Bubarnya Masyumi merupakan imbas dari sikap politik, meminjam istilah Syafii Maarif, memilih jalan martir ketimbang menyerah kepada ide Soekarno ini. Masyumi yang sudah semakin terpencil tetap saja mengadakan perlawanan terhadap gagasan dan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.³³ Sikap Masyumi seperti ini banyak disesalkan oleh banyak pihak karena akibat yang ditimbulkan di kemudian hari bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Seperti yang disesalkan Syafii Maarif,

“ Sekiranya Masyumi dapat lebih sabar dan tidak ‘tenggelam’ dalam arus idealisme martir, barangkali sistem demokrasi tidak akan tersingkir begini parah dalam sejarah modern Indonesia”.

dan di atas kuburan ini hanya diktatur yang akan memerintah”. Lihat juga Deliar Noer, *Op. Cit.*, hal. 373-395

³⁰ A. Syafii Maarif, *Op. Cit.*, hal 49

³¹ Tokoh yang terlibat diantaranya Mohammad Natsir, Boerhanuddin Harahap, Syafruddin Prawiranegara dan tokoh-tokoh lain. Lihat Deliar Noer, *Op. Cit.*, hal. 446

³² Tokoh yang ditahan berkawan-kawan seperti Prawoto Mangkusasmito, Mohammad Roem, M. Yunan Nasution, E.Z. Muttaqien, K.H.M. Isa Anshari (di Madiun). Sedangkan yang sendiri-sendiri seperti HAMKA (di Sukabumi, kemudia dipindahkan ke Jakarta), Kiai A. Mukti serta S. Soemarsono (yang mendekam di rumah tahanan militer), dan tokoh lainnya. Lihat juga *ibid*

³³ A. Syafii Maarif, *Op. Cit.*, hal. 51

Sebenarnya walaupun menyatakan diri sebagai Partai Islam, Masyumi bukanlah partai yang eksklusif dan bersedia bekerjasama dengan partai mana pun, selama masih dalam kerangka perjuangan yang sama. Masyumi juga bersedia untuk bekerjasama bahkan dalam satu kabinet dengan partai nasionalis, bahkan dengan partai non-Islam. Mereka sadar bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dan untuk membangunnya perlulah dilibatkan seluruh elemen dari rakyat itu sendiri. Ini tidak lepas dari pengaruh golongan modernis Islam dalam partai ini, yang dimotori Natsir dan kawan-kawan.

Di masa revolusi fisik kita sering melihat kerjasama antara PNI, Masyumi, dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ini bisa dilihat dalam pembentukan kabinet demi kabinet. Dengan bekerjasama dengan militer dapat memukul PKI ketika terjadi peristiwa Madiun. Tapi setelah pengembalian kedaulatan di tahun 1949 kerjasama ketiga partai tersebut tidak dapat diteruskan kembali, bahkan putus sama sekali, terutama antara PNI dan Masyumi.³⁴ Wakil dari dua partai ini kerap ditunjuk menjadi formatir dalam pembentukan kabinet pasca penyerahan kedaulatan. Namun pembentukan kabinet tidak semulus yang dibayangkan tetapi kerap menjadi titik konflik di antara kedua partai.³⁵

Kenyataan lain bisa dilihat bahwa PNI yang pernah memukul PKI di masa revolusi fisik, sesudah tahun 1959 bisa bekerjasama. Gejala lain dapat pula dilihat di dalam tubuh Masyumi, perpecahan satu golongan yaitu keluarnya PSII di tahun 1947 yang selanjutnya berdiri sendiri serta munculnya Nahdhatul Ulama (NU) di

³⁴ M. Rusli Karim, *Op. Cit.*, hal. 114

³⁵ Gejolak dalam pembentukan kabinet demi kabinet dapat dilihat dalam Deliar Noer, *Op. Cit.*, hal. 209-274

tahun 1952, yang kemudian menjadi salah satu parpol Islam.³⁶ PSII, NU, ditambah Perti kemudian membentuk Liga Muslimin, yang kerap bekerjasama dengan PNI dalam pembentukan kabinet, bahkan bersama PKI menjadi penopang Demokrasi Terpimpin. Kerjasama ini dikenal dengan konsep NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis).

Berdasarkan beberapa kenyataan itu Deliar Noer, seperti dikutip Rusli Karim, sampai pada kesimpulan bahwa kesetiakawanan, solidaritas, yang dalam hubungan ini kita kaitkan dengan konsensus, meminjam istilah Alfian, ditentukan oleh dua hal, yaitu ditentukan oleh kepentingan dan prinsip. Orang atau golongan bisa bersetia karena jika dilihat dari kedua pertimbangan itu tidak merugikan. Sebagai contoh lagi, pendirian parpol berdasarkan maklumat Pemerintah yang dikeluarkan 3 November 1945 yang sampai batas tertentu menumbuhkan solidaritas sesama partai untuk bertahan hidup dalam tahun 1950-an walaupun akhirnya Soekarno menyatakan anjuran mengubur partai-partai.³⁷

Contoh lain dapat kita lihat dalam pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo (1953 – 1955). Masyumi menyatakan tidak akan ikut dalam kabinet karena ketidaksetujuan atas program kabinet. Keputusan ini diambil atas jaminan NU bahwa mereka tidak ikut dalam kabinet bila Masyumi berada di luar. Kenyataan menunjukkan ternyata NU bersama Liga Muslimin mendapat lima kursi. Sebuah pukulan telak bagi Masyumi dan membuyarkan keinginan melihat (lagi) kerjasama antar partai Islam.³⁸

³⁶ M. Rusli Karim, *Op. Cit.*, hal. 114-115

³⁷ *Ibid*

³⁸ Deliar Noer, *op. Cit.*, hal 250

Rezim Soekarno, dengan Demokrasi Terpimpin-nya akhirnya berakhir. Hal ini ditandai dengan ditolaknya pidato pertanggungjawaban Soekarno oleh MPRS. Dengan demikian berakhirilah karier politik Soekarno sebagai presiden Indonesia. Untuk mengisi kekosongan pimpinan negara, maka MPRS mengangkatlah Soeharto sebagai pejabat sementara, yang kemudian dikukuhkan menjadi presiden definitif pada tahun 1968.

Kejatuhan Soekarno, yang diikuti naiknya Soeharto sebagai pengganti, menandakan telah bergesernya rezim pemerintahan, dari Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno, menuju sebuah Orde Baru di bawah kendali Soeharto. Perubahan pucuk pimpinan negara kemudian juga merubah paradigma dalam pemerintahan. Bila Soekarno terkenal dengan slogan “Politik sebagai Panglima”, maka Soeharto menggantinya dengan “Ekonomi sebagai Panglima”. Dalam pandangan Soeharto, keterpurukan dan instabilitas Indonesia diakibatkan konflik politik yang berkepanjangan dan melelahkan rakyat. Soeharto merubah itu semua dengan meningkatkan perekonomian negara, melalui berbagai gebrakan yang dilakukan kabinet yang dipimpinnya.

Menyadari bahwa jabatannya tidak benar-benar *legitimate*, maka Soeharto merancang sebuah Pemilihan Umum, sebagai sebuah keharusan dalam sistem demokrasi di belahan dunia manapun. Dengan Pemilu maka diharapkan akan terbantu Dewan Perwakilan, yang nantinya menggantikan peran dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) bentukan Soekarno. Dewan

Perwakilan inilah yang kemudian akan memilih pucuk pimpinan negara yang legitimate, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

Dibubarkannya Masyumi, bukan berarti semangat untuk mendirikan partai di kalangan umat Islam ikut terkubur. Semangat dan harapan akan terwujudnya Republik Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Islam tetap tertanam di hati dan pikiran umat. Mereka merindukan kembali partai Islam yang progresif, selalu memperjuangkan umat secara konsekuen dan melalui jalur yang benar.

Umat sangat merindukan kembali sebuah partai Islam, yang berpolitik secara elegant, berdebat dengan kepala dingin, dan berjuang tanpa pamrih, semata-mata hanya untuk kemaslahatan bangsa. Sejarah mencatat bahwa Masyumi merupakan kelompok orang-orang Indonesia yang paling banyak menggabungkan ketiga unsur etika Nasional Indonesia, yaitu Etika Kebangsaan Indonesia, Etika Kemodernan, dan Etika Islam. Hal ini tidak hanya diwujudkan dalam sebuah retorika namun diwujudkan dalam tingkah laku dan kepribadian para pemimpinnya. Hal ini disebabkan karena empat hal. *Pertama*, Masyumi adalah partai Islam, agama yang paling banyak meliputi wilayah Indonesia. *Kedua*, di antara partai-partai yang ada, Masyumi tercatat sebagai partai yang paling luas menyebar ke seluruh pelosok tanah air, dengan intensitas kepengikutan yang merata. *Ketiga*, selain tubuh partainya yang menyebar itu, pimpinan Masyumi adalah yang paling banyak dan lengkap mewakili secara relatif berimbang berbagai daerah dan kelompok kesukuan. *Keempat*, Masyumi adalah partai Islam yang tegas menerima modernisme dalam berbagai manifestasi dan perwujudannya, antara lain berkat pengenalan modernisme itu oleh para

pemimpin intelektualnya yang umumnya berlatar belakang pendidikan modern Belanda.³⁹

Dengan romantisme itulah maka pada dibentuklah Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Pendirian partai baru ini diprakarsai oleh berbagai organisasi sosial dan pendidikan Islam yang sebagian besar pemukanya berasal dari anggota-anggota Masyumi. Partai ini diharapkan dapat menampung aspirasi politik umat Islam yang kebetulan tak tergolong dalam wadah-wadah politik yang ada, seperti tiga partai politik lainnya.⁴⁰

Berdirinya partai ini diharapkan menjadi kelanjutan perjuangan Masyumi, sehingga pimpinan partai yang terpilih pada Kongres I tahun 1968 adalah bekas pimpinan Masyumi. Hasil Kongres tidak diterima pemerintah Orde Baru. Setelah melalui konsensus antar pemrakarsa Parmusi melalui Surat Keputusan Presiden No. 70 tahun 1968 pada Bulan Februari 1968 disahkan berdirinya Parmusi di bawah pimpinan Djarnawi Hadikusuma dan Lukman Harun.⁴¹

Sejak ini hubungan pemerintah dengan Parmusi menjadi dingin. Dan dalam saat itu pula (1970) John Naro dan Imran Kadir tampil ke muka dengan menuduh pimpinan Parmusi bersikap menentang ABRI sambil mengangkat dirinya sebagai formatir untuk membentuk pimpinan baru. Menghadapi kemelut seperti itu pemerintah pada tanggal 20 November 1970 mengeluarkan Surat

³⁹ Nurcholish Madjid dalam Laksmi Pamuntjak -Djohan, Agus Edy santoso (ed.). *Op. Cit.*, hal. 79-80

⁴⁰ M. Rusli Karim, *Op. Cit.*, hal. 157

⁴¹ *Ibid*, hal 158

Keputusan No. 77 tahun 1970 untuk mengubah pimpinan Parmusi dengan menunjuk HM Mintaredja sebagai Ketua Umum baru.⁴²

Ada beberapa alasan yang menyebabkan Pemerintah menghalangi munculnya (kembali) tokoh eks Masyumi dalam struktur Parmusi. *Pertama*, merupakan imbas dari kurang harmonisnya tokoh eks Masyumi dengan pihak militer pada masa Orde Lama. Persinggungan pertama antara Masyumi dengan militer berkenaan dengan program rasionalisasi perwira ala Nasution. Program ini banyak ditentang oleh internal militer sendiri sehingga memunculkan perkubuan dalam militer itu sendiri. Masalah yang berlarut-larut ini kemudian memaksa Hamengkubuwono IX, kala itu menjabat Menteri Pertahanan, harus meletakkan jabatannya. Peristiwa ini menimbulkan demonstrasi besar-besaran pada tanggal 17 Oktober 1952, dan kemudian berujung tindakan anarkis dengan merusak perabot Kementerian Luar Negeri. Selain itu, 17 (tujuh belas) perwira tinggi mengajukan resolusi untuk membubarkan parlemen, dan mengganggu parlemen yang tidak representatif menjadi penyebab instabilitas politik dalam negeri. Pernyataan ini kemudian dibantah oleh Masyumi, dengan menyatakan ketidaksetujuan pembubaran parlemen dengan cara-cara yang melanggar Undang-Undang. Mengenai insiden 17 Oktober 1952, Masyumi menganggap bahwa hal itu bukan bersifat spontanitas tetapi difasilitasi pihak militer.⁴³ Persinggungan kedua berkaitan dengan ketidaksetujuan Masyumi mengenai keterlibatan tentara dalam politik. Ketidaksetujuan ini dapat dilihat dari bagaimana Masyumi menyikapi masalah pimpinan tentara, dengan jalan menyerahkan pada tentara sendiri dalam

⁴² *Ibid*

⁴³ Deliar Noer, *Op. Cit.*, hal. 297

penyelesaian internal mereka. Padahal kita ketahui bersama bahwa Orde Baru berdiri dengan tentara (militer) sebagai salah satu penyangganya.

Kedua, potensi Parmusi sebagai pewaris Masyumi dikhawatirkan akan mengganggu rencana pemerintah menjadikan Golongan Karya (Gokar) sebagai partai terbesar di Indonesia. Golkar inilah yang diharapkan menjadi penyangga bagi pemerintah Orde Baru, disamping birokrasi dan ABRI (militer). Tiga kekuatan ini, biasanya disingkat ABG (ABRI, Birokrasi, Golkar), menjadi pilar penting dalam perjalanan politik rezim orde baru ke depan.

Semangat tentang kebangkitan kembali Masyumi dalam politik Indonesia tidak hanya di pusat ibukota namun juga meluas sampai ke daerah-daerah, termasuk di Pulau Lombok. Namun terdapat pergeseran peta politik di daerah ini. Nadhatul Wathan (NW) yang pada tahun 1950-an mendukung Masyumi memutuskan tidak lagi mendukung Parmusi. Ada beberapa latar belakang yang melandasi pilihan ini. *Pertama*, kegagalan L. Gde Wirasantane yang dijagokan NW untuk menduduki posisi pimpinan partai Parmusi untuk daerah Lombok. Kegagalan ini disebabkan oleh kelemahan usaha *lobbying* team sukses yang ada di belakangnya.⁴⁴ *Kedua*, NW merasa lebih terjamin kesejahteraan dan kelanjutannya di masa depan ketika bernaung di bawah partai Pemerintah (Golkar), baik dari sisi keamanan maupun materi.

Dukungan yang diberikan Tuan Guru Zainudin Abdul Madjid (dikenal dengan sebutan Tuan Guru Pancor) sebagai pimpinan NW, tidak hanya berupa

⁴⁴ Pendapat berbeda mengatakan bahwa kegagalan naiknya L. Gde Wirasantane karena intervensi Pemerintah untuk mencegah dukungan NW kepada Parmusi. Perlu diketahui L. Gde Wirasantane adalah menantu dari Tuan Guru. Juga statusnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk

dukungan pasif, tetapi aktif. Maksudnya di sini beliau bahkan tidak segan-segan untuk menjelajahi seluruh pelosok Lombok untuk memenangkan Golkar. Selain memanfaatkan jalur kultural, dengan menjual pesonanya kepada umat Islam di Lombok, beliau juga memanfaatkan jejaring pesantren yang didirikan (mantan) anak didiknya yang tersebar di seluru pelosok Lombok.

Hanya Muhammadiyah yang tetap konsisten membela Parmusi. Namun demikian dukungan yang diberikan Muhammadiyah berupa kiprah individu, karena kedekatan emosional dan rasa turut membidani berdirinya partai ini.⁴⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak pernah memaksakan kadernya untuk memilih satu partai politik. Tiap kader diberi kebebasan untuk melakukan “ijtihad politik”, menentukan sendiri ke arah mana aspirasi politiknya diberikan, dengan menimbangkan baik dan buruknya.

Dukungan yang diberikan Muhammadiyah tidak mampu memenangkan Parmusi di Lombok Timur. Dukungan NW dan ditambah pesona Tuan Guru Pancor tidak mampu dikalahkan dengan berbagai retorika dan misi partai yang ditawarkan pada masa kampanye. Umat Islam di Lombok Timur (Lotim) lebih memilih mengikuti pilihan politik *'ulama* yang dihormatinya, dengan memilih Golkar sebagai penyalur aspirasi dan kepentingan mereka di parlemen. Dengan demikian maka munculah Golkar sebagai partai pemenang di Lotim.

golongan yang “diwajibkan” memilih Golkar berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Wawancara dengan Sapiun 10 Desember 2004

Tabel 1.2. Hasil Akhir Pemilu Tahun 1971 tingkat Nasional

Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi	Persentase
GOLKAR	34.348.673	227	62,8
NU	10.213.650	58	18,67
Parmusi	2.920.740	24	7,365
PNI	3.793.266	20	6,94
PSII	1.308.237	10	2,39
Parkindo	745.359	7	1,34
Katholik	605.740	3	1,11
P.I. Perti	381.309	2	0,70

Sumber : M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, hal. 170

Pemilu berikutnya pada masa orde baru dilaksanakan pada tahun 1977. Pada Pemilu kali ini hanya dua partai politik dan satu golongan karya yang menjadi peserta. Hal ini disebabkan karena telah terjadi penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia pasca berlingasungnya Pemilu 1971. Penyederhanaan partai politik dimulai tatkala Presiden Soeharto pada tahun 1970, setahun sebelum dimulainya pemilu 1971, di depan pimpinan partai politik dan sekber Golkar mengemukakan niatnya melakukan penyederhanaan partai.

Menurut Soeharto, penyederhanaan partai politik ini sama sekali bukan dimaksudkan untuk melenyapkan partai politik, melainkan untuk memudahkan

⁴⁵ Wawancara dengan Sapiun 10 Desember 2004

pelaksanaan kampanye Pemilu. Pengelompokan yang dimaksud meliputi: kelompok Nasionalis; kelompok Spiritual dan; Golongan Karya.

PNI, Partai Murba, Partai Katolik, IPKI, dan Parkindo mengelompokkan diri dalam kelompok Nasionalis. Sementara Partai NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti mengelompokkan diri dalam kelompok Spiritual. Pengelompokan ini kemudian berlanjut dalam pembagian fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1971.

Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 1973, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 139 H, berdirilah Partai Persatuan Pembangunan, disingkat PPP, sebagai pengukuhan dari kelompok spiritual. Sementara kelompok Nasionalis membentuk Partai Demokrasi Indonesia, disingkat PDI, pada tanggal 10 Januari 1973.⁴⁶

Bersatunya kembali Parmusi, Partai NU, Partai Perti, dan PSII, mengingatkan kembali umat pada masa kejayaan Masyumi, sebelum mengalami perpecahan. Dengan potensi yang sedemikian besar dan ditambah dengan persatuan di antara pimpinan umat, maka keberadaan partai baru ini diharapkan mampu mewujudkan niat dan cita-cita umat Islam di Indonesia. Nuansa keislaman begitu kental dalam partai ini. Hal ini tidak hanya dapat dilihat dari asas partai yang berlandaskan Islam, tetapi juga diwujudkan dalam cita-cita politik dan visi partai. Cita-cita dan visi politik Partai Persatuan Pembangunan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah, "*terwujudnya suatu masyarakat*

⁴⁶ Lajnah Pemenangan Pemilu DPP PPP, 2003, *PPP dan Cita-cita Politik*, tanpa penerbit : Jakarta hal. 2

madani yang adil dan makmur yang diridloi Allah SWT, baldayatun thayyibun wa rabbun ghafur dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila."⁴⁷

Cita-cita dan visi politik PPP bila dibandingkan dengan tujuan jangka panjang Masyumi terlihat ada kemiripan. Baik PPP maupun Masyumi, menurut hemat penulis, secara legal formal tidak mencantumkan Negara Islam sebagai sebuah tujuan. Kedua partai ini menyadari bahwa sungguh berat perjuangan untuk menegakkan negara Islam di Indonesia karena keanekaragaman budaya dan agama yang dianut rakyat Indonesia. Cita-cita yang diperjuangkan hanya ingin mewujudkan masyarakat yang islami, dengan berdasar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apapun bentuk negara bukanlah sebuah permasalahan yang besar. Hal yang lebih substansial adalah mewujudkan masyarakat yang tentram, berkemanusiaan, tentram, dan toleran terhadap yang lain.

Bersatunya Parmusi, Partai NU, PSII, dan Perti, ternyata tidak menarik perhatian NW untuk memberi dukungan kepada PPP sebagai hasil fusi empat partai tersebut. Agaknya NW sudah merasa tentram dengan keberadaannya dalam kelompok pemerintah, yaitu dalam Golkar. Seperti penulis katakan di muka, bahwa perasaan tentram ini muncul karena adanya jaminan "keamanan" dan bantuan materi dari pemerintah.

Di lain pihak, Muhammadiyah masih setia memberi dukungan kepada PPP, walaupun tetap dengan pola yang sama berupa dukungan individu, tidak secara organisasi. Selain karena ikatan kultural sebagai salah satu organisasi pendiri Parmusi, Muhammadiyah masih memandang bahwa PPP merupakan

⁴⁷ *Ibid*, hal. 3-4

representasi umat Islam, dilihat dari asas partai. Namun demikian seperti Pemilu sebelumnya (baca: Pemilu 1971), Golkar masih menjadi kampiun dalam Pemilu 1977.

Tabel 1.3. Hasil Akhir Pemilu tahun 1977 tingkat Nasional

Partai	Jumlah Suara	Kursi	Persentase
Golkar	39.750.096	232	62,11
PPP	18.743.491	99	29,9
PDI	5.504.757	29	8,6

Sumber : M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, hal. 183

Menjelang Pemilu 1982 Tuan Guru mengeluarkan statement membebaskan jamaahnya untuk menentukan pilihan politiknya sendiri. Statement ini dijawab pemerintah dengan menempatkan dua unit tank di tempat dimana Tuan Guru sering mengadakan pengajian.⁴⁸ Statement ini ditarik kembali untuk menyelamatkan NW dalam melaksanakan misi keagamaannya. Golkar pun melenggang menjadi Pemenang Pemilu di Lotim.

Tabel 1.4. Hasil Akhir Pemilu 1982 tingkat Nasional

Partai	Kursi	Persentase
Golkar	246	67,58
PPP	94	25,82
PDI	24	6,59

Sumber : M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, hal. 212

Ada sebuah fenomena baru yang muncul di kalangan Muhammadiyah Lombok pada masa ini. Banyak kader Muhammadiyah mulai melakukan politik akomodatif dengan masuk menjadi pengurus Golkar, terutama dari golongan PNS sehingga pada Pemilu kali ini mulai terjadi pemencaran aspirasi politik Muhammadiyah.⁴⁹ Hal ini sangat lumrah melihat sikap netral yang diberikan Pimpinan Pusat Muhammadiyah memungkinkan kadernya untuk berafiliasi dengan partai mana pun.

Pukulan berat bagi PPP terjadi pada masa diwajibkannya penerapan asas tunggal bagi seluruh organisasi di Indonesia. Asas Islam, sebagai benteng terakhir PPP menunjukkan jati diri sebagai partai Islam akhirnya harus luluh pula. Padahal fakta sebagai partai yang berasas islam menjadi senjata pamungkas untuk menarik simpati para pemilih Islam, setelah tidak mampu mempertahankan (atau mengembalikan?) *ukhuwah Islamiyah* antar organisasi. Tidak heran bila kemudian perolehan suara PPP pada Pemilu 1987 makin jauh merosot. Bila pada masa sebelumnya asas Islam masih menjadi daya tarik utama, maka pada Pemilu kali

⁴⁸ “ *Saya melihatnya sendiri. Kejadiannya terjadi pada akhir tahun 80-an.*” Wawancara dengan

ini tidak bisa digunakan lagi. Makin berat bagi PPP ketika diharuskan mengganti lambang partai dari Kabah menjadi Bintang.

Dengan tidak lagi menetapkan Islam sebagai asas partai, dan Ka'bah sebagai lambang partai, maka PPP dianggap tidak lagi representasi umat Islam. Kini status PPP sama dengan peserta Pemilu lainnya, sama dengan PDI, dan sama juga dengan Golkar. Tidak ada yang berbeda dari luar. Maka makin banyak terjadi eksodus kader dari PPP kepada partai lain. Mereka merasa bahwa PPP tidak akan mampu menjadi rumah yang teduh dan aman dalam memperjuangkan aspirasi umat. Perpindahan kader umumnya menuju kepada partai penguasa, Golkar.

Namun demikian bila ditelisik lebih dalam, PPP sebagai representasi umat mulai banyak digugat dan dipertanyakan. Banyak di antara kader dan simpatisan partai yang mulai kecewa dengan kinerja partai. Elite partai mulai dianggap menghamba kekuasaan, dan tidak berani menerapkan *amar ma'ruf nahi munkar* di parlemen. Padahal sebagai partai Islam, PPP harus berani menentang segala bentuk kezaliman, apapun resikonya, karena yang ditakutkan hanya Tuhan semata.⁵⁰ Partai telah dikooptasi oleh pemerintah, sehingga kebijakan yang dikeluarkan hanya untuk memperkuat kedudukan rezim yang sedang berkuasa. Partai tidak lagi mampu menjadi penyeimbang pemerintah, gagal melaksanakan prinsip *check and balances* sebagai anggota parlemen.

Pada Pemilu 1992, PPP kemudian tidak mampu lagi menjadi penentu utama dalam parlemen. Untuk daerah Lotim PPP kini menjadi minoritas, dan

Suharyadi 8 Januari 2005.

⁴⁹ Wawancara dengan Sapiun 10 Desember 2004

⁵⁰ Kekecewaan pada elite partai diwujudkan dalam pernyataan, "*Kita tidak benci partainya, tapi kita benci orangnya.*" Wawancara dengan Sapiun 10 Desember 2004

memperoleh suara paling sedikit di parlemen. Jumlah kursi yang diperoleh PPP bahkan lebih kecil dari PDI, partai yang selama ini dianggap representasi umat non-muslim Indonesia.⁵¹ Politik pemerintahan orde baru yang mulai akomodatif dengan umat islam⁵² ternyata tidak mampu mendongkrak perolehan kursi PPP di DPRD tingkat II Lotim.

Tabel 1.5. Perolehan Suara Pemilu 1992 di Kabupaten Lombok Timur

PESERTA PEMILU	SUARA	KURSI
PPP	44.288	4
GOLKAR	298.945	26
PDIP	63.039	6
ABRI	-	9
JUMLAH	406.272	45

Sumber : NTB dalam Angka 1992, BPS Propinsi NTB

Perolehan suara PDI di Lotim tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi politik tingkat nasional. Tampilnya kembali keluarga Soekarno dalam pentas politik nasional, melalui wadah PDI sebagai kelanjutan PNI, menjadi salah satu faktor peningkatan suara yang diperoleh. Pesona Guruh Soekarnoputra dan Megawati

⁵¹ Tentang ini penulis ingat sebuah pernyataan di kalangan simpatisan PPP, "PPP itu partai-nya orang Islam, Golkar isinya campuran, sedangkan PDI orang Kristen' thok' isinya." Anggapan ini dapat dilihat dari fusi partai-partai yang kemudian bergabung dalam PDI.

⁵² Pada masa orde baru, Islam (politik) dianggap merupakan salah satu bahaya laten dalam NKRI. Gagasan negara Islam tetap merupakan salah satu isu penting yang dapat menyulut pemberontakan di Tanah Air. Namun pada era awal 1990-an, pemerintahan Soeharto mulai akomodatif dengan umat Islam. Hal ini ditunjukkan dengan dihapusnya larangan berjilbab, pendirian Bank Muamalat, dsb.

Soekarnoputri di panggung kampanye PDI ternyata mampu menarik dukungan rakyat. Dua anak genealogis Soekarno ini seakan mengingatkan rakyat kembali pada sosok karismatik Soekarno. Puncak dari karier politik keluarga Soekarno kemudian terwujud ketika Megawati resmi menjadi Ketua Umum PDI pada tahun 1993. Makin besarliah PDI dengan dukungan keluarga Soekarno.

Karier Megawati yang melesat bagai meteor ternyata mengkhawatirkan pemerintahan Soeharto. Rezim yang berkuasa khawatir PDI akan semakin besar sehingga mampu menyaingi partai pemerintah, Golkar. Makin besarnya PDI akan mengancam keamanan Golkar yang terus menjadi *single majority* dari pemilu ke pemilu. Ancaman terhadap Golkar berarti ancaman kepada kedudukan Soeharto sebagai presiden.

Untuk mencegahnya maka pemerintah mulai melakukan politik kooptasi. Pemerintah mendorong digelarnya Kongres PDI IV di Medan pada tahun 1996, sebagai tandingan Munas PDI 1993 yang mengesahkan Megawati sebagai ketua umum. Kongres ini kemudian menghasilkan keputusan terpilihnya ketua umum baru, Soerjadi. Tampilnya Soerjadi dalam KLB merupakan salah satu manuver politik Soeharto untuk menyingkirkan Megawati dari pentas politik.⁵³

Perpecahan partai, antar PDI hasil Munas 1993 dan PDI hasil KLB 1996, mencapai puncaknya ketika terjadi perebutan kantor DPP PDI. Aksi rebut-merebut antar dua kubu ini kemudian menyisakan kisah tragis, dengan hilangnya puluhan nyawa kader dan simpatisan PDI. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan "Tragedi 27 Juli", dan diperingati setiap tahunnya.

Gejolak dalam PDI kemudian menimbulkan implikasi pada perolehan suara pada Pemilu 1997. Kooptasi pemerintah dengan mengakui kepemimpinan hasil KLB Medan, ternyata mampu mengerdilkan PDI. Perolehan kursi PDI di DPRD tingkat II Lotim mengalami penurunan drastis, mencapai 50 %. Suara-suara yang hilang umumnya menyeberang ke Golkar dan sebagian kecil ke PPP.

Tabel 1.6. Perolehan Kursi Pemilu 1997 di Kabupaten Lombok Timur

PESERTA PEMILU	PEROLEHAN KURSI
PPP	5
GOLKAR	28
PDI	3
ABRI	9
JUMLAH	45

Sumber : Kesekretariatan DPRD Lombok Timur

Rezim Orde Baru kemudian berakhir ketika gerakan reformasi yang digalang oleh kalangan intelektual dan masyarakat. Sebuah gerakan yang mendaki perubahan pemerintahan, termasuk pucuk pimpinan negara. Gerakan yang muncul akibat ketertindasan politik dan ekonomi yang dialami rakyat. Gerakan melawan penyakit bangsa akut bangsa, yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

⁵³ Soerjadi dianggap lebih mampu mengamankan kedudukan Soeharto. Dalam statement menjelang Sidang Umum 1998, Soerjadi menjamin bahwa tidak akan ada calon presiden selain Soeharto.

Dengan jatuhnya Soeharto, maka diangkatlah Habibie sebagai presiden transisi. Pemerintahan di bawah Habibie merupakan masa transisi yang akan mengantarkan Indonesia pada era yang baru. Untuk menciptakan pemerintahan yang *legitimate* maka dirancanglah pelaksanaan Pemilu pada tahun 1999. Pemilu ini dipercepat dari jadwal semula tahun 2003 karena terjadinya perubahan kekuasaan. Dengan pelaksanaan pemilu maka akan didapatkan sebuah dewan perwakilan baru dan pemerintahan yang baru pula.

Arus demokratisasi pasca runtuhnya orde baru kemudian membuka peluang munculnya berbagai partai baru. Bila pada masa sebelumnya hanya dua partai politik⁵⁴ yang diperkenankan eksis maka pada era ini keran pendirian partai dibuka lebar. Asas partai pun beragam karena kebijakan asas tunggal kemudian dihapus. Partai-partai baru kemudian diberikan keleluasaan untuk mencantumkan selain Pancasila sebagai asas partai.

Bermunculanlah beratus-ratus partai guna menyongsong babak baru kehidupan politik Indonesia. Keran demokrasi yang dibuka lebar juga memungkinkan kembali hadirnya partai yang menjadikan Islam sebagai asas. Sambutan dari umat Islam terhadap kebijakan ini sangat antusias, dengan jalan mendirikan partai yang berasaskan Islam selain PPP yang kembali menjadikan Islam sebagai asas.

Di tengah hiruk pikuk pendirian partai Islam maka lahirlah Partai Bulan Bintang (PBB) pada Juli 1998. Partai ini mengambil bulan bintang sebagai lambang partai sesuai dengan nama partai. Pilihan lambang ini mengingatkan

⁵⁴ Bila Golkar tidak pernah disebut sebagai sebuah partai politik.

kembali pada Masyumi yang juga bertanda gambar Bulan Bintang. Simpatisan Masyumi pada masa silam sering menyebut diri sebagai keluarga Bulan Bintang. Walaupun ternyata ada partai lain yang menyebut diri secara jelas sebagai penerus Masyumi, seperti Partai Masyumi Baru pimpinan Ridwan Saidi ataupun Partai Masyumi pimpinan Abdullah Hehamua, PBB dianggap mewarisi kharisma Masyumi.⁵⁵

Ada sebuah fenomena menarik dalam pembentukan berbagai cabang PBB. Bila di daerah lain, pendirian cabang PBB dimulai secara hierarkis, artinya dari tingkatan Pusat, kemudian tingkat Propinsi (Wilayah) baru diikuti daerah-daerah yang lebih rendah. Tidak demikian dengan pendirian PBB di Nusa Tenggara Barat (NTB). PBB mulai berdiri di NTB diawali dengan pembentukan di Kabupaten Lotim. Dengan demikian pendirian PBB Lotim menjadi pionir dalam eksistensi PBB di NTB. Berdirinya PBB di Lotim kemudian diikuti di daerah lain, termasuk dalam tingkatan yang lebih tinggi, Pimpinan Wilayah PBB NTB.

Walaupun PBB menurut sebagian pengamat dikatakan sebagai penerus Masyumi namun belum menarik perhatian masyarakat Lotim. Walaupun secara historis NW memiliki hubungan dengan Masyumi masa silam, pada Pemilu 1999, NW ternyata tidak mendukung PBB, justru malah mendukung Partai Daulat Rakyat (PDR). Salah satu faktor pendorong NW memilih PDR karena salah satu program partai di lokal Propinsi NTB adalah memperjuangkan salah satu anggota keluarga Tuan Guru Pancor untuk menduduki posisi Walikota Kotamadya

⁵⁵ Ali Said Damanik, 2002, *Fenomena Partai Keadilan : Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Teraju : Jakarta, hal. 220

Mataram pada tahun itu juga. Hal ini menarik perhatian jamaah NW untuk mendukung PDR di Lotim.

Tabel 1.7. Perolehan Suara Pemilu 1999 di Kabupaten Lombok Timur

NAMA PARTAI	SUARA	KURSI
GOLKAR	192.720	18
PDI-P	40.225	4
PPP	39.300	4
PDR	29.372	3
PAN	13.126	1
PBB	10.845	1
PDI	9.637	1
PKB	9.188	1
SUNI	6.725	1
PNU	6.094	1
PKP	4.463	1
PNI	4.324	1
MASYUMI	3.236	1
PBI	1.348	1
TNI/POLRI	-	5

Sumber : KPU Propinsi NTB

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa dengan dukungan NW, PDR hanya meraih 3 kursi di parlemen, jauh lebih kecil dari perolehan kursi Golkar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, dukungan yang diberikan NW kepada PDR masih “setengah hati”, dukungan tidak secara tegas diumumkan kepada jamaah NW. *Kedua*, dukungan diberikan dalam waktu yang singkat

menjelang Pemilu sehingga belum tersosialisasikan sampai ke pelosok desa, tempat di mana jamaah NW berada. *Ketiga*, jamaah NW masih terombang-ambing akibat dualisme kepemimpinan sehingga lebih memilih Golkar, yang secara historis politik lebih dekat dengan NW.⁵⁶

Harapan besar yang diberikan jamaah NW kemudian disia-siakan oleh PDR. Calon legislatif yang melenggang ke parlemen ternyata tidak mewakili NW, baik secara kultural dan struktural. Anggota legislatif yang diangkat ternyata dari pengurus PDR sendiri, bukan merupakan wakil dari NW. Kebijakan ini tentu mengecewakan karena harapan jangka pendek NW adalah menempatkan wakilnya dalam parlemen. Kekecewaan ditambah pula dengan kegagalan tokoh yang diusung NW menduduki posisi Walikota Kotamadya Mataram untuk periode 1999-2004.

PBB sebagai penerus Masyumi layak kecewa dengan perolehannya di Lombok Timur. Walaupun menyandang nama besar sebagai pewaris Masyumi, PBB gagal menempatkan jumlah yang signifikan dalam DPRD tingkat II Lotim untuk periode 1999-2004. Nama besar Yusril Ihza Mahendra yang dijuluki Natsir Muda ternyata tidak mampu mendongkrak perolehan partai di Lombok Timur.

Untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu berikutnya, PBB melakukan konsolidasi dan bertekad menjadi pemenang. Menghadapi Pemilu 2004 PBB melakukan pendekatan-pendekatan politik kepada tokoh masyarakat dan para tuan guru. PBB sadar bahwa masyarakat Lombok Timur amat

⁵⁶ Dualisme kepemimpinan karena terjadi "perebutan" kekuasaan di antara anak-anak Tuan Guru Zainuddin Abdul Madjid. Akhirnya timbul dua NW, yaitu "NW Pancor" dibawah kendali Umi Rahun dan "NW Anjani" dibawah Umi Raihanun. Pembahasan lebih lanjut dititikberatkan pada kiprah "NW Pancor", selanjutnya disingkat NW.

menghormati para tuan guru dan patuh kepada fatwanya sehingga mencerminkan paternalistik dalam masyarakat. Untuk itu langkah paling tepat adalah mendekati tokoh masyarakat dan para tuan guru untuk mendongkrak perolehan suara.⁵⁷

Usaha itu berbuah hasil dengan meningkatnya perolehan suara PBB di Kabupaten Lombok Timur. Peningkatan perolehan suara yang dicapai luar biasa, mencapai 7 kali lipat (700 %). Dengan jumlah ini maka PBB menduduki urutan kedua dalam perolehan suara di kabupaten Lotim pada pemilu 2004.

Tabel 1.8. Perolehan Suara Pemilu 2004 di Kabupaten Lombok Timur.

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI
GOLKAR	103.019	11
PBB	96.848	8
PBR	68.802	7
PPP	45.823	4
PDI-P	32.775	5
PAN	16.556	2
PKB	15.031	1
PATRIOT PANCASILA	14.790	2
PKS	13.930	2
PKPI	19.756	1
PSI	9.517	1

Sumber : KPU Daerah Lombok Timur

Peningkatan perolehan suara PBB yang luar biasa, jauh dari yang diperkirakan. Peningkatan perolehan suara PBB ini tentulah sebuah fenomena menarik dalam politik nasional. Sebuah perubahan drastis, dari hanya memperoleh 1 kursi (2,22 %) di DPRD Kabupaten Lombok Timur, melonjak menjadi 8 kursi (17,78 %). Berbagai hal yang menyebabkan peningkatan perolehan suara PBB dalam Pemilu 2004 di Kabupaten Lotim inilah yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian.

B. Perumusan Masalah

“ Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan perolehan suara Partai Bulan Bintang pada Pemilihan Umum 2004 di Kabupaten Lombok Timur ?”

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan suara Partai Bulan Bintang pada Pemilu 2004 di Kabupaten Lombok Timur.
2. Mengetahui faktor yang memegang peranan dalam kemenangan sebuah partai politik di Kabupaten Lombok Timur.

Harapan dari penelitian yang kami lakukan adalah dapat bermanfaat untuk diri kami sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agama. Namun demikian dua manfaat yang dapat diperoleh yaitu,

- I. Manfaat Akademik : Menambah khasanah keilmuan dalam studi ilmu politik, terutama kajian mengenai strategi Partai Politik memenangkan Pemilu.
- II. Manfaat Praktis : Dapat dijadikan bahan referensi dalam berbagai studi mengenai peta politik di daerah Lombok Timur.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Partai Politik

Asal usul Partai Politik

Kemunculan partai politik tidak dipisahkan dari ide untuk melibatkan rakyat secara lebih aktif dalam pemerintahan. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dengan pemerintah di lain pihak.⁵⁸ Dengan demikian keberadaan partai politik selalu dikaitkan dengan gagasan kedaulatan rakyat atau yang lebih dikenal dengan konsep demokrasi.

Dalam tulisannya yang berjudul *Asal Mula Partai Politik*, Maurice Duverger membagi kemunculan partai politik berdasar dari lingkungan mana ia

⁵⁸ Miriam Budiardjo, 1993, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia : Jakarta hal 159

tumbuh. Partai politik kerap muncul sebagai akibat berkelindan dari kemunculan kelompok-kelompok parlemen, yang diikuti pembentukan kelompok pemilihan. Adapun dasar dari pengelompokan ini dapat berupa kesamaan ideologi yang doktriner maupun kesamaan lokalitas atau daerah. Kadang-kadang pembentukan partai politik dapat bersifat sangat pragmatis, yaitu mengantarkan seorang individu menduduki jabatan tertentu baik di parlemen maupun pemerintahan. Kemunculan partai politik seperti ini disebut dengan *Partai yang Tumbuh dalam Lingkungan Intra-Parlemen*. Dalam studi lebih lanjut ditemukan ternyata bahwa pembentukan partai politik dalam lingkungan intra parlemen tidak lepas dari pengaruh kelompok dalam masyarakat seperti kaum intelektual, cendekiawan, filosof, yang berada di luar parlemen. Golongan ini kemudian mendirikan partai politik sehingga disebut sebagai *Partai yang Terbentuk di Luar Lingkungan Parlemen*.⁵⁹

Ditinjau dari kebutuhan pendiriannya, kemunculan partai politik dapat dijelaskan dengan tiga teori. *Pertama*, Teori Kelembagaan, menyatakan bahwa partai politik muncul karena kebutuhan dari anggota parlemen untuk mengadakan kontak dengan masyarakat, dan terjadilah partai politik. Masyarakat kemudian membentuk partai politik sendiri yang lain. *Kedua*, Teori Situasi Historik, kemunculan partai politik sebagai akibat dari perubahan struktur dalam masyarakat dari tradisional menjadi lebih modern. Tuntutan masyarakat modern menyebabkan timbulnya tiga krisis; legitimasi, integrasi dan partisipasi. Permasalahan tersebut bermuara pada tuntutan pelibatan masyarakat untuk ikut

⁵⁹ Dalam Ichlasul Amal (ed.), 1996, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana ; Yogyakarta hal. 1-17

serta dalam proses politik. Untuk mengatasi tiga permasalahan inilah partai politik dibentuk. *Ketiga*, Teori Modernisasi, kemunculan partai politik merupakan konsekuensi logis dari produk modernisasi sosial ekonomi.⁶⁰

Definisi Partai Politik

Menurut Carl J. Friederich, partai politik merupakan sebuah organisasi yang memberi kemanfaatan kepada anggota-anggotanya.

“ Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idill maupun materiil.”⁶¹

Partai politik memberikan kemanfaatan kepada anggotanya berdasarkan kekuasaan dalam pemerintahan dalam pemilihan kebijaksanaan umum. Seperti definisi yang diberikan R.H. Soltau.

“ Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang – dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih – bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum tersebut.”⁶²

Kekuasaan yang diraih partai politik merupakan hasil dari persaingan dari atas golongan-golongan dalam merebut simpati rakyat. Neudman mengartikan partai politik sebagai.

⁶⁰ Eman Hermawan, 2001, *Politik Membela yang Benar : Teori, Kritik, dan Nalar*, KLIK dan Garda Bangsa : Yogyakarta hal. 69-70

⁶¹ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, h. 161

“ Organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan yang mempunyai pandangan berbeda.”⁶³

Dari beberapa definisi di atas dapat kita katakan beberapa karakteristik partai politik, yaitu 1) sekelompok orang yang terorganisir, 2) memiliki tujuan yang sama yaitu merebut kekuasaan dan mempertahankannya, 3) mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian partai politik dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusionil – untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁶⁴

Di era modern ini hampir semua negara memiliki partai politik. Dalam negara demokrasi keberadaannya inern dengan sistem demokrasi itu sendiri. Dalam negara modern, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi :

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik ialah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Masyarakat modern memiliki pendapat dan aspirasi yang beragam dengan berbagai kepentingan yang melatarbelakanginya. Pendapat ini kemudian

“penggabungan kepentingan” (*interest aggregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan kepentingan” (*interest articulation*).⁶⁵

Semua proses ini dilakukan oleh partai politik. Partai politik selanjutnya memprosesnya menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan publik (*public policy*). Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Di lain pihak, partai politik juga berfungsi menyebarluaskan berbagai rencana dan kebijakan pemerintah. Sehingga terjadi arus informasi dari bawah ke atas, dan dari atas ke bawah. Dengan demikian partai politik memiliki dua fungsi, bahwa bagi pemerintah partai politik berfungsi sebagai pendengar, sedangkan bagi rakyat berfungsi sebagai pengeras suara.

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik.

Partai politik juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada.

kanak-kanak hingga dewasa. Proses sosialisasi politik juga mencakup proses penyampaian norma-norma dari satu generasi ke generasi selanjutnya.⁶⁶

Guna meraih dukungan dalam Pemilu, partai politik kemudian berusaha untuk menciptakan “image” bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Dengan keterikatan solidaritas dengan partai, partai politik mendidik anggota-anggotanya untuk menyadari hak dan tanggungjawabnya sebagai warga negara, sekaligus memupuk identitas dan integrasi nasional.

3. Partai politik sebagai sarana rekrutment politik

Partai politik juga berfungsi untuk mengajak orang untuk aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian partai politik telah memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Partai juga berusaha menarik kader muda potensial untuk dididik menjadi kader yang akan menggantikan pimpinan lama di masa mendatang.⁶⁷

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang lumrah dalam iklim demokrasi. Hal yang terpenting ialah bagaimana menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini sehingga tidak menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Di sinilah peran partai politik. Untuk itu dalam negara demokrasi partai politik menyetujui keinginan dan aspirasi golongan

golongan masyarakat, untuk diselaraskan dan disepakati sebagai pedoman hidup bersama.⁶⁸

2. Patronase Ulama

Perkataan arab '*ulama* adalah bentuk jamak dari '*alim* yang artinya ialah orang yang ber-'*ilm* (ilmu). Jadi kaum '*ulama* artinya kaum berilmu, atau para sarjana.⁶⁹ Penggunaan kata '*ulama* yang sebenarnya bermakna sangat luas, setiap orang yang memiliki ilmu apapun disebut '*ulama*, mengalami penyempitan makna. Masa kini gelar '*ulama* diberikan pada orang-orang yang ahli agama saja, berbeda dengan penggunaannya di masa lalu.

'*Ulama* merupakan sebutan dari elite agama yang seringkali dikaitkan dengan Islam karena kata ulama berasal dari bahasa arab. Sebutan bagi elite agama (Islam) ini berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya. Ada yang menyebut dengan "kiai" (umumnya di pulau Jawa), "syeikh", ataupun "Tuan Guru". Secara umum penggunaan kata "kiai" menjadi kata pengganti yang paling sering digunakan secara luas.

Sesungguhnya pengertian kiai tidak selalu merujuk pada '*ulama*. Kiai pada umumnya memiliki persepsi yang berbeda-beda. Hal ini didasarkan atas persepsi masing-masingnya berbeda, antara lain,

- a. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat. Umpamanya "Kiai Ganda Kencana" dipakai untuk sebutan sebuah kereta emas yang ada di Keraton Yogyakarta.

⁶⁸ *Ibid*

- b. Gelar kehormatan untuk orang-orang pada umumnya.
- c. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang atau sebuah organisasi Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pondok pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik kepada santrinya.⁷⁰

Menurut Zamakhsari Dhofier, sebagian besar kiai memandang pondok pesantren sebagai kerajaan kecil di mana ia merupakan sumber mutlak kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) dalam lingkungan hidup pesantren. Tidak seorang santri atau orang lain yang dapat melawan kekuasaan kiai (dalam lingkungan pesantren) kecuali kiai lain yang lebih luas pengaruhnya. Para santri selalu menganggap dan berpikir bahwa kiai yang dianutnya merupakan orang yang percaya penuh pada dirinya sendiri (*self confident*), baik dalam pengetahuan islam maupun dalam bidang kekuasaan dan manajemen pesantren.⁷¹

Dalam masyarakat *'ulama* menduduki posisi penting, terutama masyarakat tradisional dan agraris. Kedudukan yang begitu penting ini dilekatkan pada seseorang secara otomatis oleh masyarakat, tanpa adanya pengangkatan secara resmi. Kedudukan yang begitu terhormat dalam masyarakat secara sengaja dan tidak sengaja dipertahankan oleh *'ulama* baik karena otoritas yang dibangun berdasar syariat agama maupun keunggulan dalam pemahaman mengenai masalah-masalah agama.

⁶⁹ Nurcholish Madjid, 2002, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Paramadina : Jakarta, hal. 96

⁷⁰ Zamakhsari Dhofier, 1980, *Menemukan Kembali Pesantren: Studi Tentang Peranan Hidup Kiai*, LPRES.

Pada mulanya 'ulama hanya memfokuskan diri untuk terutama bergerak dalam bidang-bidang keagamaan seperti *syariah* atau *fikih*. Mereka berfungsi sebagai “penafsir” syariat yang diwahyukan Tuhan ke dalam fikih, tetapi juga sekaligus sebagai “penjaga” hukum Tuhan (*Custodian of God Law*) dari berbagai kemungkinan penyimpangan. Kedudukan ini diperkuat pula dengan pemberian status tinggi kepada mereka sebagai “pewaris para nabi” (*waratsa al anbiya*).⁷²

Tetapi tidak jarang kita temui dengan alasan-alasan tertentu, atau kepentingan berdakwah melalui politik, atau bahkan karena jaring-jaring politik yang sulit mereka hindari, ulama merasa perlu untuk terjun dalam politik. Dalam konteks terakhir, alasan tambahan bahkan sering dikemukakan, bahwa pada dasarnya tidak ada pemisahan antara agama (*'din*) dengan politik (*siyasa*). Di sini politik dipandang sebagai bagian integral dari agama, dan karena itu tidak perlu dijauhi; sebaliknya bahkan perlu diceburi.⁷³

Seringkali kita perhatikan, kharisma kiai dapat mempengaruhi dalam pembentukan sikap dan perilaku dalam masyarakat, termasuk di dalamnya sikap politik. Bahkan kiai mempunyai kemampuan untuk memobilisasi dan menumbuhkan partisipasi aktif dalam masyarakat. Apalagi dalam kehidupan politik, kiai merupakan kekuatan yang paling diperhitungkan keberadaannya.

Clifford Geertz mencatat bahwa para ulama dalam politik cukup signifikan. Para ulama tidak saja berperan sebagai “broker” di bidang kebudayaan akan tetapi dalam perkembangannya malahan memainkan peran yang sangat signifikan sebagai pemimpin-pemimpin politik. Dalam kaitannya dengan politik,

⁷² Azyumardi Azra, 2002, *Hubungan Agama dan Negara : Menuju Kerukunan Antar Umat*, Kompas : Jakarta, hal. 121

atau proses politik tertentu, tetapi bahkan untuk mendukung suatu sistem politik atau kekuasaan politik tertentu secara keseluruhan, dan tidak jarang bahkan tanpa *reserve*.⁷⁴ Tidak jarang dalam masyarakat kita temukan bahwa pendapat atau pilihan dari seorang ulama, terutama bagi massa mengambang, tidak hanya bernilai profan tetapi juga bernafaskan nilai keagamaan. Dukungan yang diberikan kepada orang atau partai tertentu sering disertai dengan penggunaan ayat suci dan hadits nabi. Terkesan apa yang diberikan ulama bukan hanya keputusan politik tetapi fatwa agama.

Legitimasi politik ulama dibangun atas basis kultural tradisional seperti hubungan yang sangat pribadi (*highly personal*), patron-client, ada kewajiban-kewajiban yang terbatas, dan hubungan-hubungan itu berada dalam kultur patriarkhal dan tradisional (*authority relationship*).⁷⁵ Bahkan dengan penggunaan simbol-simbol keagamaan dan keulamaan dalam politik, meminjam istilah Max Weber, adalah legitimasi kharismatik.

Dari beberapa alasan yang menyebabkan munculnya ulama dalam politik, pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan negara kerap menjadi alasan utama. Dengan terjun dalam politik, ulama berharap dapat berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Bagi mereka perpolitikan adalah pengurusan rakyat, baik buruknya rakyat, lurus tidaknya akidah mereka, serta sejahtera-sengsaranya umat bergantung kepada penguasa dan bagaimana mereka mengurus politik.

⁷³ *Ibid*, hal. 75

⁷⁴ *Ibid*, hal 76

⁷⁵ M.M. Billah, *Agama dan Politik : Pergeseran Pola Kepemimpinan*, dalam Prisma 5 tahun 1978

akidah mereka, serta sejahtera-sengsaranya umat bergantung kepada penguasa dan bagaimana mereka mengurus politik.

Ketelibatan ulama dalam politik merupakan pengejawantahan dari “Islam politik”. Apa yang dimaksud “Islam Politik”? Menurut Gulalp, seperti dikutip Azra, secara sederhana dalam pandangan umum, “Islam politik” adalah islam yang muncul atau ditampilkan sebagai kerangka atau basis ideologi politik, yang kemudian menjelma dalam bentuk partai politik. Lebih tegas lagi, “Islam politik” adalah islam yang berusaha mewujudkan dan diaktualisasikan dalam kekuasaan dan kelembagaan politik resmi, khususnya pada bidang eksekutif dan legislatif. Memakai kerangka sejahrawan MGS Hogdson, “Islam politik adalah “Islamdom”, Islam yang mengejawantah dalam (*political power*).⁷⁶

Pelaksanaan “Islam politik” dalam kehidupan kenegaraan kerap menimbulkan ketegangan-ketegangan, baik secara konstitusional maupun radikal bersenjata. Ketegangan ini muncul sebagai akibat dari pandangan sebagian besar umat (islam) bahwa agama ini berbeda dengan agama lain. Islam dipandang sebagai agama yang paripurna, Islam adalah falsafah hidup sekaligus ideologi bagi penganutnya.⁷⁷ Maxim Rodinson, seorang intelektual Marxis yang cukup banyak mendalami kajian-kajian islam, ikut membenarkan pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa agama islam memang menyuguhkan kepada para pemeluknya suatu proyek kemasyarakatan, suatu program yang harus diwujudkan di muka bumi.⁷⁸

⁷⁶ Azumardi Azra, *Op. Cit.*, hal 124

⁷⁷ M. Natsir, 2001, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Media Dakwah : Jakarta, hal. 78

⁷⁸ Ahmad Syafii Maarif, 1985, *Islam dan Masalah Ketatanegaraan*, LP3ES : Jakarta, hal.

Sebagian lain berpendapat bahwa ideologi Islam itu sebenarnya tidak ada, dan hanya merupakan respon atas modernisasi barat. Penjajahan negara barat atas negara-negara islam menimbulkan sikap anti barat, dan kemudian dicarilah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pembangkit dari rasa nasionalisme untuk menentang penguasaan barat. Maka gagasan ideologi Islam yang dilaksanakan dalam sebuah sistem kenegaraan dianggap merupakan faktor penting dalam membangun rasa nasionalisme tersebut.⁷⁹

Pelaksanaan ideologi islam dalam bingkai kenegaraan senantiasa merujuk pada bukti nyata pendirian “negara Madinah” di tanah Arab oleh Rasulullah. Bentuk ini kerap dijadikan sebagai contoh ideal pelaksanaan Islam sebagai ideologi oleh umat. Oleh para intelektual islam dan orientalis, bangunan negara ini dianggap sebagai sebuah negara paling modern di masanya, dan merupakan bukti bahwa Islam juga mengatur masalah yang bersifat kenegaraan. Simak yang ditulis oleh Dhiauddin Rais

“Sistem yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan kaum mukminin yang hidup bersama beliau jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern - tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem par excellence....Dengan demikian, suatu sistem dapat menyandang dua karakter itu sekaligus karena hakekat Islam yang sempurna merangkum urusan-urusan materi dan ruhani, dan mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat.”⁸⁰

Bangunan negara yang didirikan Rasulullah dianggap merupakan bentuk masyarakat baru, berbeda dengan sebelum kedatangannya dari Mekkah.

⁷⁹ Salah satu penganut “paham” ini adalah Nurcholish Madjid. Lihat Nurcholish Madjid, 1996, *Islam, kemodernan, dan Keindonesiaan*, Mizan : Bandung

⁸⁰ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press : Jakarta, hal. 4

Rasulullah telah membangun sebuah tatanan masyarakat baru yang bertingkah laku dan patuh terhadap satu peraturan perundangan, menuju tujuan yang sama, dalam satu daerah yang sama, di bawah pimpinannya, baik sebagai Rasul dan Nabi sekaligus kepala negara. Masyarakat baru yang dibangun disini telah memenuhi syarat sebagai sebuah masyarakat politik, atau yang kemudian dikenal dengan negara.⁸¹

Pendapat demikian dapat dibenarkan karena ajaran Islam tidak hanya mengatur urusan mahluk dengan Tuhan-nya tetapi juga antar sesama manusia, bahkan antara manusia dengan alam sekitar. Apa yang diterapkan Rasulullah dalam negara Madinah mungkin saja bersumber dari nilai keilahian, berdasar apa yang diajarkan Tuhan kepadanya. Tetapi apakah dengan demikian kita mengambil kesimpulan bahwa mendirikan (apa yang disebut) negara Islam hukumnya wajib bagi umat Islam? Dalam ajaran Islam, baik secara jelas dan tersamar tidak menunjukkan sifat-sifat politik dalam agama Islam. Rasulullah hanyalah seorang Nabi, dan bukan raja. Bahkan pada suatu kesempatan ia menolak untuk diangkat sebagai raja.⁸²

Dalam ajaran Islam, Al Quran dan Sunnah menempati posisi pertama dan kedua dalam yurispedensi Islam. Maka pernyataan mengenai kewajiban mendirikan negara Islam haruslah dilihat dalam dua sumber di atas. *Islamic state* atau negara Islam, tidaklah ada dalam Al Qur'an dan Sunnah.⁸³ Oleh karena itu, tidak ada perintah dalam islam untuk mendirikan negara Islam. Menegakkan etos

⁸¹ *Ibid*, hal. 7

⁸² Ali Abd-ar-Raziq, 2002, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan*, Jendela : Yogyakarta, hal. 90

⁸³ M. Amien Rais, *Tidak Ada Negara Islam*, dalam Laksmi Agus Pamuntjak dan Djohan Agus Edy Santoso, *Op. Cit.*, hal XXIII

islam, dalam arti menciptakan masyarakat yang egaliter, menindas eksploitasi manusia atas manusia lainnya, jauh lebih penting dari bentuk formal negara Islam itu sendiri.⁸⁴ Tak ada konsep baku tentang negara Islam, apalagi yang bersifat Illahiah dan kekal. Al-Quran hanya menjelaskan konsep tentang masyarakat, bukan tentang negara. Apa yang disebut teori negara Islam di kalangan umat hanya merupakan penyesuaian terhadap keadaan tertentu.⁸⁵

Bangunan negara Madinah yang kerap disebut sebagai contoh dalam penerapan ideologi Islam oleh kaum muslimin, dalam pelaksanaannya merupakan langkah pragmatik Rasulullah tanpa mengabaikan situasi yang konkrit.⁸⁶ Ketika menjadi seorang kepala negara di Madinah, Rasulullah senantiasa melihat dirinya tidak hanya sebagai nabi terakhir, tetapi juga otoritas terakhir hukum Tuhan di muka bumi. Kendatipun ia merasa beberapa orang sahabat mampu menangani urusan umat sesudah wafatnya, ia tidak mungkin mewariskan kewenangan Ilahi/kenabiannya kepada seseorang.⁸⁷ Kemudian ia tidak mewariskan satu konsep yang jelas mengenai pergantian atau suksesi karena hal tersebut tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Bukan berarti islam tidak memerlukan negara. Untuk menjamin pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan umat, maka al-Qur'an memandang pentingnya kekuasaan. Negara diharapkan berperan sebagai institusi "pemaksa"

⁸⁴ *Ibid*, hal. XIII-XIV

⁸⁵ Ashgar Ali Engineer, 2000, *Devolusi Negara Islam*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, hal. 325

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ Mahmoud M. Ayoub, 2003, *The Crisis of Muslim History*, Mizan : Bandung, hal. 201

bagi pelaksanaan perintah dan ajaran moralnya.⁸⁸ Adapun mengenai nama negara atau atribut yang disandangnya bukanlah persoalan fundamental.⁸⁹

Secara ringkas terdapat tiga aliran dalam memandang hubungan antara Islam dan negara. *Pertama*, memandang bahwa Islam adalah agama paripurna dan mengatur masalah kenegaraan, artinya terdapat gabungan antara *dawlah* dan *risalah*. *Kedua*, menolak pendapat yang menyatakan bahwa ajaran Islam mengatur masalah kenegaraan. Islam tidak memiliki tendensi apa pun dalam politik. *Ketiga*, pihak yang mencoba mencari jalan tengah di antara dua pendapat di atas. Menurutnya, ajaran Islam hanya memberikan dasar-dasar dalam pembentukan sebuah negara, sedangkan bentuk dan sistemnya diserahkan kepada hasil kreatifitas manusia.⁹⁰

3. Pemilihan Umum

Dalam negara demokrasi, salah satu pilar yang membangunnya adalah terjadinya proses pergantian kepemimpinan nasional (suksesi) secara berkesinambungan. Proses pergantian kepemimpinan itu umumnya dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu), yang digelar beberapa tahun sekali.

Mohammad Kusnadi dan Harmaily Ibrahim mendefinisikan Pemilu sebagai

⁸⁸ Ahmad Syafii Maarif, *Op. Cit.*, hal. 192

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Lihat juga Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, UI Press : Jakarta, hal. 1-3

“Pemilihan Umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil –wakil rakyat dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu – waktu tertentu.”⁹¹

Selain untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen, Pemilu juga menjadi sarana bagi rakyat untuk meminta pertanggungjawaban wakil – wakilnya. Seperti dikatakan oleh Sukarna,

“Pemilihan Umum merupakan suatu alat atau cara untuk memperoleh wakil-wakil rakyat yang akan mempertanggungjawabkan kepentingan rakyat dan bertanggungjawab atas hasilnya.”⁹²

Pemilu memiliki arti penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan menjadi sebuah sarana bagi rakyat untuk memaksa pemerintah menerapkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Seperti dikatakan oleh Bagir Manan,

“Pemilihan Umum yang dilaksanakan dalam siklus lima tahun (5 tahun sekali) merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintahan oleh rakyat. Pada saat Pemilihan Umum itulah semua calon yang ingin duduk sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan bergantung sepenuhnya pada keinginan atau kehendak rakyat.”⁹³

Secara umum Pemilu adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil – wakil rakyat atau anggota DPR. Adapun tujuan dari Pemilihan Umum secara garis besar ada tiga. *Pertama*, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. *Kedua*, mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat sehingga integrasi masyarakat

⁹¹ Mashudi, “Pengertian – pengertian tentang.....”, hal. 2

⁹² Sukarna, 1990, *Sistem Politik*, Citra Aditya Bakti : Bandung, hal 83

Dalam sistem demokrasi kontemporer dikenal dua sistem Pemilu, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Pilihan sistem mana yang dilaksanakan dalam sebuah negara demokrasi bergantung pada kondisi dan situasi negara yang bersangkutan. Secara garis besar perbedaan dua sistem Pemilu diperlihatkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.9. Perbandingan Sistem Proporsional dan Distrik Murni

Sistem Unsur	Proporsional Murni	Distrik Murni
Daerah Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> - Basis wilayah - Ukuran besar - Jumlah daerah pemilihan sedikit 	<ul style="list-style-type: none"> - Basis penduduk - Ukuran kecil - Jumlah daerah pemilihan banyak
Wakil	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih dari satu daerah pemilihan - Asas wakil bebas - Hubungan dengan pemilih melalui partai - Kurang/tidak dikenal - Dicalonkan partai - Pengawasan pemilih kurang - Bertanggungjawab kepada partai 	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya ada satu daerah pemilihan - Ada syarat domisili - Hubungan dengan pemilih langsung atau melalui partai - Diawasi pemilih - Dicalonkan pemilih atau partai - Pengawasan pemilih kuat
Suara	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada yang hilang - Mayoritas mutlak (di atas 50 persen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada yang hilang - Mayoritas sederhana (bisa di bawah 50 persen).
Partai	<ul style="list-style-type: none"> - Menguntungkan partai kecil - Cenderung multipartai - Kekuasaan besar terhadap wakil - Organisasi partai 	<ul style="list-style-type: none"> - Merugikan partai kecil - Cenderung bipartai - Kekuasaan kecil terhadap wakil - Organisasi partai setingkat desa
Organisasi Pelaksana	Bersifat otonom	Bersifat otonom
Sistem pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengarah ke pemerintahan koalisi - Sentralisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mengarah ke pemerintahan koalisi - Desentralisasi

Dikutip dari : Eman Hermawan, *Politik Membela yang Benar*, h. 85

Pemilihan Umum 2004

Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 merupakan yang kedua kali pada masa Orde Reformasi. Sistem Pemilu 2004 berbeda dengan sistem sebelumnya. Pada sistem sekarang, ada pemilu legislatif (DPR, DPRD, dan DPD) dan pemilu eksekutif (presiden dan wakil presiden) yang masing-masing dipisah. Untuk kepentingan penelitian ini kami hanya akan membahas mengenai pemilihan anggota legislatif (Pemilu legislatif).

Pemilu legislatif 2004 dilaksanakan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di pemilu legislatif tidak hanya memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana sistem sebelumnya, tetapi juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sehingga ada dua pemilu untuk legislatif pada pemilu 2004, yakni pemilu DPR dan DPRD di satu sisi, dan pemilu untuk anggota DPD di sisi lain. Kedua pemilu tersebut (Pemilu DPR/DPRD dan Pemilu DPD) menggunakan sistem berbeda. Pada pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Sedangkan untuk Pemilu DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak.⁹⁵

Sistem proporsional dengan daftar terbuka adalah sebuah sistem yang memungkinkan bagi pemilih untuk secara terbuka mengetahui daftar nama caleg yang dijagokan oleh parpol peserta pemilu. Surat suara dalam sistem ini disamping akan memuat nomor dan tanda gambar parpol peserta pemilu juga akan

⁹⁵ Pasal 6 ayat 1 dan 2

menampilkan daftar caleg untuk setiap daerah pemilihan. Dengan demikian pemilih tidak saja akan dapat menentukan pilihannya pada salah satu parpol peserta pemilu, tetapi sekaligus juga memilih salah satu caleg yang diajukan oleh parpol.⁹⁶

Dalam pemilu legislatif 2004 juga mengenal adanya daerah pemilihan. Daerah pemilihan adalah daerah yang ditetapkan sebagai wilayah perebutan kursi DPR/DPRD. Setiap daerah pemilihan akan memperebutkan 3-12 kursi.⁹⁷ Masing-masing tingkat perwakilan mempunyai cakupan wilayah daerah pemilihan yang berbeda. Adapun bermacam-macam daerah pemilihan adalah sebagai berikut:

- Daerah pemilihan DPR adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi.
- Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota.
- Daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan.⁹⁸

Daerah pemilihan (distrik) untuk anggota DPD Provinsi. Setiap provinsi (distrik) akan memperebutkan 4 (empat) kursi DPD, sehingga disebut distrik berwakil banyak, karena menggunakan sistem distrik dan memperebutkan banyak kursi.⁹⁹

⁹⁶ Buletin InfoDEM Edisi 1 Th. 1 November 2003

⁹⁷ Pasal 46 ayat 2

⁹⁸ Pasal 46 ayat 1

⁹⁹ Buletin InfoDEM

Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Sedangkan peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.¹⁰⁰

4. Prilaku Politik

Dalam perkembangan terbaru tumbuhlah suatu hampiran dalam ilmu politik yang dilakukan secara bersama-sama terutama oleh psikologi sosial, sosiologi dan antropologi sosial. Hampiran gabungan ini terkenal dengan nama "*political behavior approach*". Hampiran ini boleh dikatakan merupakan suatu hampiran baru yang lain sama sekali dari pada sekedar penjumlahan hampiran-hampiran beberapa ilmu. Hampiran ini terutama mengambil sebagai sarannya adalah perilaku manusia, baik perilaku jasmaniah yang nyata maupun yang merupakan perlambang saja.¹⁰¹

Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.¹⁰²

Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Adapun dalam kategori individu aktor politik

¹⁰⁰ Pasal 5 ayat 1 dan 2

¹⁰¹ The Liang Gie, 1992, *Ilmu Politik : Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkupan dan Metodologi*, Gajah Mada University Press ; Yogyakarta, hal. 92

¹⁰² Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo : Jakarta, hal. 131

meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga negara biasa. Yang dimaksud dengan agregasi adalah individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan bangsa. Sedangkan yang dipelajari dalam tipologi kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelist, dan demokrat.¹⁰³

Kajian terhadap perilaku politik seringkali dijelaskan dari sudut psikologik di samping pendekatan struktural fungsional dan struktural konflik. Berikut ini diuraikan sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik yang merupakan kombinasi ketiga pendekatan di atas. Menurut model ini terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik.

- a) Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa.
- b) Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan.
- c) Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
- d) Faktor lingkungan sosial politik berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang,

¹⁰³ *Ibid*, hal. 132

kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.¹⁰⁴

Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Kalau memutuskan memilih, apakah memilih partai atau kandidat X ataukah partai atau kandidat Y?

Pertanyaan-pertanyaan di atas, termasuk pertanyaan mengapa memilih memilih kontestan tertentu dan bukan kontestan lain dapat dijawab dengan lima pendekatan, yaitu :

- a) Pendekatan struktural. Melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh partai.
- b) Pendekatan sosiologis. Menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Kongkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (desa-kota), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.
- c) Pendekatan ekologis. Pendekatan ini hanya relevan dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 132-133

berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

- d) Pendekatan psikologi sosial. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.
- e) Pendekatan rasional. Melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada.¹⁰⁵

Keempat pendekatan di atas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun dalam beberapa kasus di negara berkembang, perlu juga diperhatikan mengenai pengaruh dari para pemimpin tertentu. Kepemimpinan yang dimaksud berupa kepemimpinan tradisonal (kepala adat dan kepala suku), religius (pemimpin agama), patron-klien (tuan tanah-buruh penggarap), dan birokratik otoriter (para pejabat pemerintah, polisi, dan militer). Pengaruh para

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 145-146

pemimpin ini tidak selalu berupa persuasi, tetapi acap kali berupa manipulasi, intimidasi, dan ancaman paksaan.¹⁰⁶

F. Definisi Konsepsional

1. Partai Politik adalah sekumpulan orang dalam satu organisasi yang bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan aktif dalam lembaga legislatif.
2. *Ulama* adalah orang atau individu yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat karena kedalaman ilmu agama yang dimiliki.
3. Pemilihan umum adalah suatu cara agi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya dan dilaksanakan secara teratur dalam waktu-waktu tertentu.
4. Perilaku politik adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

G. Metode Penelitian

I. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan gejala-gejala, fakta, fenomena dan relasi dalam masyarakat secara obyektif sehingga dapat dipahami situasi-situasi yang tengah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan penelitian jenis kualitatif gejala-gejala dalam masyarakat dapat

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 147

ditembus dengan menginterpretasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.¹⁰⁷

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif maka sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Atherton dan Klemmark, sebagaimana dikutip Soehartono, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala hubungan antara dua gejala atau lebih.¹⁰⁸ Metode penelitian deskriptif memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual dan ia merupakan representasi obyektif terhadap fenomena yang ditangkap. Selain itu teori-teori, konsep dan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.¹⁰⁹

2. Batasan Masalah

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan faktor –faktor yang menyebabkan peningkatan perolehan suara PBB pada Pemilu 2004. Peningkatan tersebut tentu saja bersifat kompleks, baik dari faktor internal maupun eksternal partai. Untuk kepentingan penelitian ini kami akan membatasi pada empat hal. Yaitu 1) Struktur pengurus partai, apakah struktur pengurus partai memberikan pengaruh terhadap perolehan suara partai; 2) fungsi partai politik, bagaimana PBB menjalankan fungsinya

¹⁰⁷ Conny Semiawan, 1994, *Metodologi Penelitian Survei Kuantitatif*, Rosdakarya : Bandung, hal. 4

¹⁰⁸ Soehartono, 1996, *Metode Penelitian Sosial*, Rineka Cipta : Jakarta, hal. 35

¹⁰⁹ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito : Bandung, hal. 141

sebagai partai politik dalam periode 1999-2004; 3) Kandidat dalam Pemilu 2004, yaitu calon legislatif PBB tiap daerah daerah pemilihan, termasuk strategi penentuan daftar urut dan penempatan dalam sebuah daerah pemilihan; dan 4) Isu kampanye yang diusung PBB, apakah menjadi sebuah faktor daya tarik bagi pemilih.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa pertimbangan dalam hal pemilihan lokasi. *Pertama*, di Kabupaten Lombok Timur terjadi peningkatan perolehan suara sebesar 700% yang diraih PBB dalam Pemilu 2004, dibandingkan perolehan pada Pemilu 1999. *Kedua*, peningkatan perolehan suara yang diraih PBB di Lotim jauh lebih besar dari persentase kenaikan perolehan PBB untuk tingkat nasional pada Pemilu 2004.

Tabel 1.10. Perbandingan Perolehan Suara PBB pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004

Tingkat	Pemilu 1999	Pemilu 2004
Nasional	2.049.708	2.970.487
Lombok Timur	10.845	96.848

Sumber Data : Diolah dari berbagai sumber

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini kami menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para pelaku politik. Untuk memperoleh data ini dengan melakukan wawancara dan observasi.

Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder. Bahan (data - *pen.*) sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka. Klasifikasi itu mungkin tidak sesuai bagi keperluan peneliti dan karena itu harus menyusunnya kembali menurut masalah yang dihadapinya.¹¹⁰ Data sekunder dihimpun melalui dokumen-dokumen negara maupun media massa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam (dengan *tape recorder*).¹¹¹ Berdasarkan atas perencanaan pertanyaannya wawancara dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. *Pertama*, Wawancara Pembicaraan Informal. Wawancara jenis ini berjalan secara spontanitas, terkesan seperti biasa dan wajar, pihak

¹¹⁰ S. Nasution, 1996, *Metode Research*, Bumi Aksara : Jakarta, hal. 149

¹¹¹ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju: Bandung, hal. 67-68

yang diwawancarai tidak merasa dirinya sedang diwawancarai. *Kedua*, Pendekatan menggunakan Petunjuk Umum Wawancara. Jenis wawancara ini menuntut pewawancara menyusun pokok-pokok dari hal yang akan diwawancarai sebelum wawancara dilakukan. *Ketiga*, Wawancara Baku Terbuka. Wawancara jenis ini menggunakan seperangkat pertanyaan baku dengan cara penyajian sama pada setiap responden, sehingga keluwesan pertanyaan pendalaman terbatas.¹¹²

2. Observasi

Secara umum observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan di sini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.¹¹³

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dari dokumen-dokumen atau buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

6. Teknik Analisa Data

Dalam pelaksanaan penganalisaan data, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa

¹¹² Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya : Bandung, hal. 135-136

¹¹³ Kartini Kartono, *Op. Cit.*, hal. 19

pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹¹⁴

Penelitian kualitatif menggunakan analisa data secara induktif. Analisis induktif ini digunakan karena beberapa alasan. *Pertama*, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data; *kedua*, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti dan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akontabel; *ketiga*, analisis demikian lebih dapat menguraikan secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya; *keempat*, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan; dan terakhir, analisis demikian sebagai bagian analisis analitik.¹¹⁵

¹¹⁴ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hal. 5

¹¹⁵ *Ibid*